

**ANALISIS PROGRAM PANDU KELUARGA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PAKEM INDONESIA) DI DESA SUMBERGEDE
LAMPUNG TIMUR**

Skripsi

Oleh

**KHOZIN ASRORI
NPM 1816041051**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK:**ANALISIS PROGRAM PANDU KELUARGA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PAKEM INDONESIA) DI DESA SUMBERGEDE
LAMPUNG TIMUR****Oleh:****Khozin Asrori**

Berdasarkan data BP2MI jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut menimbulkan sebuah dampak negatif yaitu kurang optimalnya pola asuh bagi anak PMI. Oleh karena itu UPT BP2MI Bandar Lampung memberikan gagasan sebagai alternatif solusi guna mengatasi permasalahan tersebut dalam bentuk sebuah program yang bernama Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pakem Indonesia). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pakem Indonesia) di Desa Sumbergede Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Program Pakem Indonesia terbagi kedalam 2 kategori, yaitu pola asuh dan pendidikan anak serta pelayanan migrasi. Pada kategori pertama proses implementasi berjalan kurang efektif, dikarenakan keterbatasan anggaran yang dialokasikan dalam menjalankan program. Sementara kategori kedua dapat berjalan dengan efektif, dikarenakan adanya dukungan penuh yang diberikan oleh berbagai aktor, khususnya UPT BP2MI Bandar Lampung dalam memberikan diseminasi informasi. Sementara yang menjadi faktor penghambat dalam proses implementasi program yaitu karena terbatasnya anggaran, kurangnya fasilitas dan sarana prasarana penunjang.

Kata Kunci: PMI , Implementasi Program, Pakem Indonesia

ABSTRACT:**ANALYSIS OF THE FAMILY GUIDE PROGRAM FOR INDONESIAN
MIGRANT WORKERS (PAKEM INDONESIA) IN SUMBERGEDE
VILLAGE, LAMPUNG TIMUR****By:****Khozin Asrori**

According to BP2MI data, the number of PMIs working abroad always increase. This rise has a negative impact, specifically a lack of optimal parenting for PMI children. As a result, UPT BP2MI Bandar Lampung offers an alternative solution to these issues in the form of a program with the name Pandu Families of Indonesian Migrant Workers (Pakem Indonesia). The purpose of this research is to analyze how the implementation of Indonesian Migrant Worker Family Guide Program (Pakem Indonesia) in Sumbergede Village, East Lampung. This study using qualitative method with a descriptive approach. Data collection methods include observation, interviews, and documentation. Data analysis includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results show that, the implementation of the Indonesian Pakem Program have two categories: parenting and child education and migration services. The first category is not running effectively due to lack of budget allocation. While the second category can function effectively due to the full support by various actors, particularly UPT BP2MI Bandar Lampung in providing information dissemination. While the lack of a budget and supporting facilities are obstacles to the implementation.

Keywords: PMI, Program Implementation, Pakem Indonesia

**ANALISIS PROGRAM PANDU KELUARGA PEKERJA MIGRAN
INDONESIA (PAKEM INDONESIA) DI DESA SUMBERGEDE
LAMPUNG TIMUR**

Oleh

KHOZIN ASRORI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI NEGARA**

Pada

**Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **ANALISIS PROGRAM PANDU KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PAKEM INDONESIA) DI DESA SUMBERGEDE LAMPUNG TIMUR**


Nama Mahasiswa : **Khazin Asrori**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816041051**

Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**

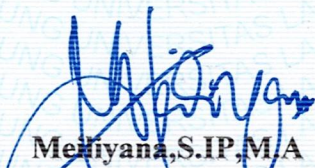
Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**




Meliyana, S.IP, M.A
NIP. 1974052020011122002


Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.
NIP. 198308152010122002

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara


Meliyana, S.IP, M.A
NIP. 1974052020011122002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Meiliyana, S.IP,M.A.**

Sekretaris : **Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.**

Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Susana Indriyati C. S.IP.,M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ica Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

A handwritten signature in blue ink, positioned above a dotted line.

A handwritten signature in blue ink, positioned above a dotted line.

A handwritten signature in blue ink, positioned above a dotted line.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **25 Juli 2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung

Bandar Lampung, 25 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



Khazin Asrori

NPM 1816041051

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Pajar Mataram tepatnya di Kecamatan Seputih Mataram



Kabupaten Lampung Tengah pada 12 Maret 1998, merupakan putra dari Bapak Romadhon dan Ibu Ismawati, anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai jenjang pendidikan di SD Negeri 3 Fajar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 6 Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dan melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Pada tahun 2018 penulis

melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Melalui Jalur SBMPTN dan terdaftar sebagai salah satu mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara. Selama menjalani perkuliahan penulis aktif mengikuti beberapa organisasi kampus seperti diantaranya DPM-U KBM unila sebagai anggota komisi 4 kerjasama dan hubungan luar pada periode tahun 2019-2020,serta aktif menjadi Kepala Bidang Kajian Pengembangan Keilmuan Himagara (Himpunan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara) periode tahun 2020/2021. Sementara pada organisasi eksternal kampus penulis tergabung dalam bagian Etos_id Lampung sebagai Presiden Etos_id Lampung periode 2019-2021. Selain itu penulis juga aktif dalam kegiatan komunitas sosial dan berperan sebagai BPI (Badan Pengawas Internal).

Pada tahun 2021 penulis melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat pada bulan Januari dan Februari melalui kegiatan KKN (Kuliah Kerja Nyata) selama 40 hari di Desa Varia Agung Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian pada bulan Agustus tahun 2021 penulis melaksanakan kegiatan magang melalui program MBKM (Magang Bersertifikat Kampus Merdeka) selama 6 Bulan pada UPT BP2MI Bandar Lampung.

MOTTO

“Setiap keberhasilan yang ku peroleh adalah karena doa Ibu, sementara setiap kegagalan yang ku peroleh karena kurang optimalnya usaha yang ku lakukan”

(Khozin Asrori)

Pendidikan adalah jalan menuju masa depan, karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini.

(Malcolm X)

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang maha esa yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi seorang pelindung, penolong dan juga pemberi kemudahan serta kenikmatan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Teriring ucap serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. dan semoga dengan terselesainya skripsi ini maka dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Segala ketulusan hati, saya persembahkan karya sederhana saya ini kepada: “Bapak dan Ibu ku Tercinta”

Terima kasih yang tak terhingga karena telah ikhlas membesarkan, mendidik, mendoakan dan memberikan kasih sayang yang tiada hentinya. Terima kasih atas segala pengorbanan, motivasi yang menguatkan ku di perantauan, selalu memberikan semangat disegala sesuatu yang telah menjadi pilihan hidupku dan mendukung serta mendoakan setiap langkahku menuju kesuksesan.

Terimakasih untuk seluruh Dosen, Staff, rekan rekan Etos_Id dan juga teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Administrasi Negara semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan dari yang maha kuasa.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin,Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**ANALISIS PROGRAM PANDU KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PAKEM INDONESIA) DI DESA SUMBERGEDE LAMPUNG TIMUR**” yang penyajiannya tersusun secara sistematis. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari skripsi ini tidak akan tersusun secara baik melainkan adanya dukungan,bantuan dan juga bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis,penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dra.Ida Nurhaida M.Si,Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiik Universitas Lampung
2. Ibu Meiliyana S.IP.,MA., Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiik Universitas Lampung
3. Ibu Ita Prihantika S.Sos.,M.A Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politiik Universitas Lampung
4. Ibu Dr. Novita Tresiana, S.Sos.,M.Si. Selaku Dosen pembimbing akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan
5. Ibu Meiliyana,S.IP, M.A. Selaku Dosen pembimbing utama penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu,waktu,nesihat,dan juga bimbingannya yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik
6. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP. Selaku dosen pembantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih atas ilmu,waktu,nesihat,dan juga bimbingannya yang sangat membantu

penulis dalam menyelesaikan skripsi ini agar penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Ibu Dr. Susana Indriyati C. S.IP.,M.Si. Selaku dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih atas segala kritik, saran dan masukan yang membangun yang telah diberikan untuk membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi agar menjadi lebih baik.
8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama melaksanakan kegiatan perkuliahan.
9. Mba Wulan dan Pak Johari selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah dan selalu memberikan pelayanan kepada penulis berkaitan dengan administrasi dalam perkuliahan maupun penyusunan skripsi.
10. Bapak Ahmad Salabi, S.H, MM. selaku Kepala Badan UPT BP2MI Bandar Lampung, Bapak Waydinsyah, S.Sos sebagai Subkoor Perlindungan dan Pemberdayaan, Mba Ulfa Mubarika S.Sos sebagai staff perlindungan dan pemberdayaan sekaligus sebagai inisiator program, Pak Muhammad Meidi, SH PLT Subkoor Penyiapan dan Penempatan, Ibu Lyse Nuriska, SH selaku Subkoor Kelembagaan dan Pemasarakatan Program, Ahmad Fauzy, S.E, MM. Selaku Subkoor Tata Usaha, Mba Dani, S, Sos staff penyiapan dan penempatan, Mba Praja Setiawati, S, Psi staff perlindungan dan pemberdayaan dan seluruh jajaran UPT BP2MI Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam memberikan data penelitian sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Bapak Suradal selaku Kepala Desa Sumbergede, Bapak Zainal Arifin selaku Sekretaris Desa Sumbergede sekaligus Ketua Satgas Pakem Indonesia, Pak Dian selaku Sekretaris Satgas Pakem, Ibu Hermawati Selaku Ketua PKK Sumbergede, Mba Deasy Selaku anggota Karang Taruna Sumbergede, masyarakat Sumbergede khususnya PMI yang telah

membantu dalam hal memberikan data untuk penelitian saya sehingga penelitian saya dapat terselesaikan.

12. Teristimewa dan Orang yang kubanggakan kedua orang tuaku Ibunda Ismawati dan Ayahanda Romadhon. Terima kasih atas segala doa, kerja keras, restu dan kasih sayang yang telah diberikan serta segala bentuk dukungan dan motivasi, semangat yang sangat luar biasa tiada putusnya yang telah diberikan sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik
13. Adik ku tersayang Ahmad Nasyiruddin Al-Bani terimakasih telah menjadi adik yang baik dan selalu memberikan semangat serta motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Keluarga besar Pawiro Sumarto Family dan juga Raton Family, paman serta bibiku, persepupuanku serta seluruh saudaraku yang telah memberikan dukungan, doa dan juga kasih sayang.
14. Lembaga DD Pendidikan yang telah mempercayai saya menjadi salah satu *awardee* Beasiswa Etos_id dan telah banyak memberikan dukungan dalam berbagai hal mulai dari materil, pembentukan karakter, *capacity building* dan semua yang telah diberikan kepada saya dari semester awal sampai dengan semester akhir ini sehingga saya sampai dititik ini dengan dukungan yang telah diberikan.
15. Untuk teman-teman seperjuanganku dari penulis MABA hingga penulis sudah berada di titik ini KPK (Panji Krisdi), Andi, Teddy, Januar, Daniel, Tedjo, Ami, Dela (Bu sekkid), Chiesa, Tini, Meylin, Rosi. Terimakasih telah membantu penulis dalam proses penyusunan dan berbagai proses dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Pembimbing Etos Kak Wahyu, Kak Rian, Kak Al, Kak Wicak, Kak Pujo, Kak Dani dan Mba Endah yang senantiasa membimbing saya dari awal masuk dalam dunia perkuliahan hingga sampai pada titik ini.
17. Teman teman Etos khususnya angkatan pertama, Wahyudi, Hilmi, Dendi, Fai, Rican, Soni, Rendi, Amiza, Sahrul dan teman-teman etos angkatan

kedua Armi, Sely, Irma, Mirda, Muflihah, Dwi, Ayu, Novita, Indah, Nurindah yang telah menjadi teman sekaligus keluarga etos yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat hingga mencapai titik ini.

18. Teman-teman Magang UPT BP2MI Bandar Lampung Krisdi, Teddy, Mba Tia, Tiza, Septi, Indri, Siti, Fitri dan Ayu yang selalu membantu khususnya selama magang dan proses penyusunan awal skripsi.
19. Teman-teman Andalusia, Kepengurusan Himagara 2021, serta abang mba jurusan Administrasi Negara Mba Savira yang telah banyak memberikan dukungan, pengalaman dan juga motivasi selama penyusunan skripsi ini.
20. Teman teman masa kecil Amril, Fasub, Roni yang telah banyak membantu khususnya dalam hal memotivasi penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
21. Seluruh pihak yang terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuan serta semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga skripsi ini dapat berguna dan memberi manfaat bagi kita semua. Penulis meminta maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan yang telah kalian berikan mendapatkan balasan dari Allah SWT Aamiin Allahuma Aamiin.

Bandar Lampung, 25 Juli 2022

Penulis

Khozin Asrori

DAFTAR ISI:

	Halaman
DAFTAR ISI:	xv
DAFTAR DIAGRAM:	xvii
DAFTAR TABEL:	xviii
DAFTAR GAMBAR:	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	12
1.4 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu	13
2.2 Kebijakan Publik	15
2.3 Implementasi Kebijakan	17
2.4 Program.....	23
2.5 Pakem Indonesia	24
2.6 Kerangka Pikir.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian.....	28
3.2 Fokus Penelitian	29
3.3 Lokasi Penelitian	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
3.7 Teknik Keabsahan Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	41

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1 Profil Desa Sumbergede	41
4.1.2 Sejarah Desa	41
4.1.3 Kependudukan	42
4.1.4 Keadaan Sosial	43
4.1.5 Keadaan Ekonomi	45
4.2 Program Pakem Indonesia	48
4.2.1 Gambaran Umum Program	48
4.2.2 Tujuan Program	51
4.2.3 Sasaran Penerima Manfaat Program	52
4.2.4 Landasan Hukum.....	52
4.2.5 Perkembangan Program	53
4.3 Hasil Penelitian.....	55
4.3.1 Perilaku Organisasi dan Antar-organisasi.....	55
4.3.2 Perilaku Birokrasi Level Bawah.....	79
4.3.3 Perilaku Kelompok Sasaran.....	85
4.4 Faktor Yang Mempengaruhi.....	91
4.4.1 Faktor Penghambat.....	91
4.4.2 Faktor Pendukung.....	94
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	96
5.1 Kesimpulan	96
5.2 Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA:	98
LAMPIRAN	102

DAFTAR DIAGRAM:

	Halaman
Diagram 1 Data PMI Seluruh Indonesia Tahun 2017-2020	3
Diagram 2 Data Jumlah PMI asal Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020	4

DAFTAR TABEL:

	Halaman
Tabel 1 Data PMI Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020.....	5
Tabel 2 Data PMI Lampung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020	5
Tabel 3 Data Informan dalam Penelitian	33
Tabel 4 Data Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	42
Tabel 5 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia	43
Tabel 6 Data Pendidikan Desa Sumbergede.....	44
Tabel 7 Data Jumlah Warga Sumbergede Dengan Pendidikan Khusus	45
Tabel 8 Data Pekerjaan Warga Desa Sumbergede.....	45
Tabel 9 Data PMI Lampung Timur Berdasarkan Sektor Pekerjaan Tahun 2017-2020.....	46
Tabel 10 Data PMI Desa Sumbergede Berdasarkan Sektor Pekerjaan.....	47
Tabel 11 Data PMI Lampung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020.....	47
Tabel 12 Data PMI Desa Sumbergede Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 13 Perbandingan Sebelum dan Setelah Adanya Program Pakem Indonesia	54
Tabel 14 Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2017	63

DAFTAR GAMBAR:

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pikir	26
Gambar 2 Struktur Organisasi Satgas Program Pakem	51
Gambar 3 Pola Asuh dan Pendidikan Anak	61
Gambar 4 Draft Perdes.....	67
Gambar 5 Pengesahan Perdes.....	69

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia sebesar 270,20 juta jiwa (BPS, 2020). Dengan jumlah tersebut, Indonesia berada di posisi keempat sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia dikenal menjadi salah satu negara pengirim pekerja migran terbanyak di kawasan Asia. Pengiriman pekerja migran ini dilakukan agar masyarakat dapat bekerja ke luar negeri sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. Proses pengiriman penduduk yang menjadi tenaga kerja merupakan bagian dari terjadinya proses migrasi tenaga kerja (Widiyahseno et al., 2018).

Menurut (Putri et al., 2019) terjadinya migrasi tenaga kerja internasional bertujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja dalam jangka yang relatif pendek (*short-term labour shortages*) yang ada pada negara tujuan. Penyebab utama terjadinya migrasi tenaga kerja internasional adalah ketidaksamaan tingkat upah yang terjadi secara global. Sehingga menyebabkan perpindahan penduduk dari negara pengirim atau *sending country* ke negara penerima tenaga kerja migran atau *receiving country*.

Secara sederhana pekerja migran dapat didefinisikan sebagai angkatan kerja dan/atau tenaga kerja yang sudah memiliki pekerjaan di luar negeri. Definisi *migrant worker* tersebut sesuai dengan definisi luas dari PBB (Hamid, 2019). Definisi mengenai *migrant worker* mengacu kepada Konvensi ILO pada Buruh Migran tahun 1949, yaitu orang yang bermigrasi dari suatu negara ke negara lain untuk tujuan bekerja (Khuana, 2020). Sementara dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Pekerja Migran Indonesia (PMI) didefinisikan sebagai setiap warga

negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

Terjadinya proses migrasi dipengaruhi dengan adanya faktor yang melatarbelakanginya. Faktor yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan migrasi adalah adanya *push and pull factors*. Kedua faktor tersebut menjadi faktor pendorong terjadinya migrasi dan faktor penarik terjadinya migrasi. Faktor yang menjadi pendorong untuk melakukan migrasi adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk meninggalkan negara asal, sedangkan faktor penarik adalah sejumlah faktor yang mempengaruhi arus masuk migrasi (Haryono, 2017).

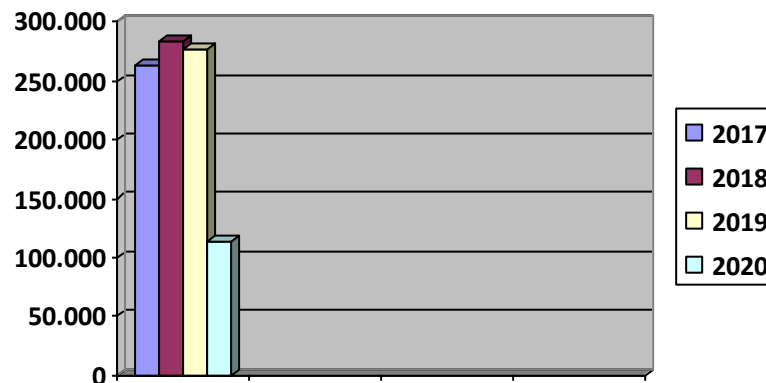
Menurut (Haryono, 2017) faktor pendorong terjadinya migrasi yaitu karena adanya dorongan ekonomi yang melatarbelakanginya. Beberapa faktor pendorong terjadinya proses migrasi diantaranya adalah upaya untuk meningkatkan standar hidup, kualitas pendidikan, serta ketertarikan adanya fasilitas yang jauh lebih baik bagi pekerja migran. Meningkatnya ketimpangan (*inequality*) antar negara yang dilihat sebagai insentif yang turut berperan dalam menambah keinginan pekerja migran untuk keluar dari negara asalnya. Sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya migrasi khususnya bagi negara berkembang menuju negara maju.

Sementara yang menjadi faktor penarik terjadinya migrasi terbagi menjadi beberapa faktor. Pertama, tingginya permintaan imigrasi dikarenakan kondisi demografi yang terjadi di negara maju yang cenderung menunjukkan penurunan angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang rendah. Kedua, adanya permintaan tenaga kerja ahli di negara maju. Ketiga, meningkatnya *rekrutmen* tenaga kerja kontrak untuk mengisi posisi pada pelayanan jasa dari perusahaan asing yang memiliki cabang di luar negeri. Keempat, peningkatan tren *outsourcing*, khususnya pada perekrutan tenaga kerja kontraktual di suatu perusahaan yang ada di luar negeri (Haryono, 2017).

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) angka pekerja migran dari tahun ke tahun, jumlahnya mengalami fluktuasi yang cenderung mengalami peningkatan. Bahkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Orberta jr et al dalam (Noveria, 2017) akibat dari banyaknya PMI yang

bekerja di luar negeri, menjadikan Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penyumbang tenaga kerja migran internasional terbesar dikawasan Asia. Dengan tingginya sumbangan pekerja migran, hal ini menjadikan Indonesia dalam sembilan negara pengirim tenaga kerja terbanyak yang ada di Asia (Noveria, 2017). Data BP2MI pada periode tahun 2017-2020 yang bekerja ke luar negeri baik pada sektor formal maupun sektor non-formal menunjukkan bahwa adanya fluktuasi jumlah pekerja migran indonesia. Data PMI dapat disajikan sebagai berikut:

Diagram 1 Data PMI Seluruh Indonesia Tahun 2017-2020

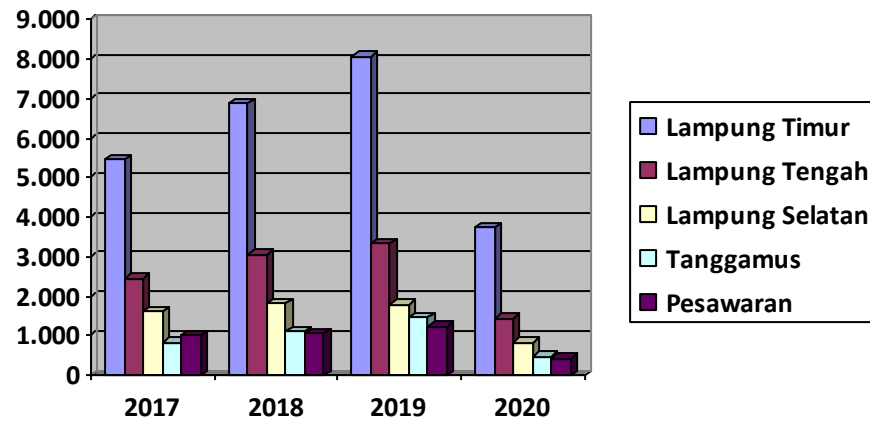


Sumber : UPT BP2MI Bandar Lampung, 2020

Berdasarkan data diagram 1 terjadi peningkatan jumlah PMI yang bekerja ke luar negeri sebanyak 20.741 pada periode tahun 2017-2018. Dengan rincian pada tahun 2017 jumlah pekerja migran sebanyak 262.899 orang meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 283.640 pekerja migran atau jika dihitung dalam jumlah persentase maka peningkatan jumlah pekerja migran pada tahun 2017 sampai dengan 2018 telah terjadi peningkatan sebesar 7,8%. Sementara pada periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 justru terjadi penurunan angka pekerja migran sebesar 7.087. Dengan rincian jumlah pekerja migran pada tahun 2018 sebanyak 283.640 menjadi sebanyak 276.553 pekerja migran pada tahun 2019. Dengan kata lain apabila dihitung dalam persentase maka pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 telah terjadi penurunan sebesar 2,5%. Selanjutnya pada tahun 2020 angka PMI kembali mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang

jumlahnya sebanyak 276.553 PMI menjadi 113.173 PMI atau telah terjadi penurunan sebesar 59% dari tahun sebelumnya akibat dari adanya pandemi covid-19.

Diagram 2 Data Jumlah PMI asal Provinsi Lampung Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2020



Sumber : Data BP2MI, 2020

Berdasarkan data diagram 2 persebaran PMI yang berasal dari Provinsi Lampung jumlah terbanyak yaitu berada di Kabupaten Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Tanggamus, dan Pesawaran. Dari data tersebut menunjukkan bahwa persebaran jumlah PMI yang berasal dari Provinsi Lampung tidak merata. Dalam kurun waktu empat tahun mulai dari tahun 2017-2020 masih didominasi oleh Kabupaten Lampung Timur. Kabupaten Lampung Timur dapat dikatakan menjadi kantong PMI di Provinsi Lampung. Secara keseluruhan jumlah PMI yang berasal dari Provinsi Lampung cenderung mengalami peningkatan, kecuali di tahun 2020 yang mengalami penurunan sebagai dampak dari adanya pandemi.

Tabel 1 Data PMI Provinsi Lampung Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020

No	Jenis Kelamin	2017	2018	2019	2020
1	Laki-laki	3.586	5.033	5.216	1.856
2.	Perempuan	11.785	13.810	16.249	7.336
	Total	15.371	18.843	21.465	9.192

Sumber : Data BP2MI, 2020

Berdasarkan data tabel 1 angka PMI di Provinsi Lampung pada periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 masih didominasi oleh PMI perempuan. Secara rinci persentase jumlah PMI asal Provinsi Lampung berdasarkan tabel di atas yaitu pada tahun 2017 jumlah persentase pekerja perempuan sebesar 76,6 % sementara persentase jumlah pekerja laki-laki sebesar 23,4%, tahun 2018 jumlah persentase pekerja perempuan sebesar 73% sementara jumlah pekerja laki-laki sebesar 27%, tahun 2019 jumlah persentase pekerja perempuan sebesar 75% sementara jumlah persentase pekerja laki-laki sebesar 25%, dan pada tahun 2020 jumlah persentase pekerja perempuan sebesar 79% sementara jumlah persentase pekerja laki-laki sebesar 21%.

Tabel 2 Data PMI Lampung Timur Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017-2020

No	Sektor	2017	2018	2019	2020
1.	Laki-laki	1.451	1.978	2.107	812
2.	Perempuan	4.023	4.916	5.974	2.915
	Total	5.474	6.894	8.081	3.727

Sumber: UPT BP2MI Bandar Lampung, 2020

Berdasarkan data tabel 2 jumlah PMI yang berasal dari Lampung Timur setiap tahunnya mengalami peningkatan sebelum adanya pandemi. Sementara jumlah tenaga kerja yang bekerja sebagai PMI masih didominasi oleh perempuan. Setiap tahunnya angka pekerja migran mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat pada tiap tahunnya, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan.

Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 disebabkan karena adanya pandemi covid-19 yang terjadi.

Tingginya antusias yang terjadi, khususnya bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Timur untuk bekerja ke luar negeri pada akhirnya memberikan sebuah dampak. Baik itu dampak yang sifatnya positif maupun dampak yang sifatnya negatif. Dampak positif dari tingginya antusias masyarakat untuk dapat bekerja ke luar negeri yaitu dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi negara dari sektor sumbangan devisa yang diberikan oleh PMI dari pengiriman remitansi (Ndarujati, 2021).

Menurut (Dibyantoro, 2014) penggunaan remitansi oleh PMI memiliki beberapa pola. Berdasarkan atas prioritas penggunaan, pola penggunaan remitansi memiliki dua pola yaitu pola penggunaan remitansi produktif dan pola penggunaan remitansi konsumtif. Pola penggunaan remitansi produktif terbentuk karena penggunaan remitansi lebih ditujukan untuk prioritas penggunaan yang sifatnya dalam jangka panjang seperti *investasi* pada bidang pertanian dengan melakukan pembelian tanah atau digunakan sebagai biaya pendidikan bagi anak. Pola penggunaan remitansi konsumtif terbentuk karena adanya prioritas penggunaan yang terkait dengan kebutuhan rumah tangga keluarga atau yang sifatnya dalam jangka yang pendek bagi PMI itu sendiri seperti pembelian kendaraan, renovasi rumah, dan pembayaran hutang (Dibyantoro, 2014).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan pada 23 Agustus 2021, pola penggunaan remitansi yang terjadi di Desa Sumbergede Lampung Timur yaitu pola konsumtif. Masyarakat cenderung menggunakan remitansi untuk hal-hal konsumtif seperti membeli barang, merenovasi rumah, membayar hutang dan lain sebagainya. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi karena pada akhirnya banyak PMI yang kembali untuk bekerja ke luar negeri, dikarenakan penggunaan remitansi yang tidak dikelola dengan baik.

Dengan tingginya PMI yang bekerja ke luar negeri maka akan memberikan dampak negatif yang ditinggalkan. Terlebih karena sebagian besar PMI didominasi oleh wanita, maka hal ini menimbulkan permasalahan baru bagi

keluarga yang ditinggalkan. Wanita yang bekerja sebagai PMI harus meninggalkan keluarga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang diberikan. Status wanita sebagai PMI terlebih wanita yang telah berkeluarga memiliki dampak terhadap keutuhan keluarganya (Anggraini et al., 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Zainal (Sekdes Sumbergede) pada 10 Desember 2021, angka perceraian keluarga PMI di Desa Sumbergede cukup tinggi. Berdasarkan data yang yang diperoleh, angka perceraian PMI yang ada di Sumbergede mencapai 80%. Hal ini menunjukkan bahwa PMI yang bekerja ke luar negeri juga rentan terhadap keutuhan keluarga yang bersangkutan. Keluarga yang tidak utuh rentan menimbulkan berbagai persoalan baru khususnya mengenai persoalan psikologi dan sosial.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Puspitawati & Setioningsih, 2011) anak-anak yang ditinggalkan oleh orangtua yang bekerja sebagai PMI cenderung lebih banyak mengalami permasalahan psikososial. Beberapa permasalahan psikososial yang terjadi seperti gangguan emosional pada anak, kecenderungan anak yang sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan, hiperaktif, cenderung lebih pasif dalam setiap menghadapi permasalahan, dan yang terberat adalah terjadinya stres dengan kategori tinggi yang dialami oleh anak (Puspitawati & Setioningsih, 2011).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Puspitawati & Setioningsih, 2011) fenomena mengenai kecenderungan anak PMI yang mengalami permasalahan psikososial terjadi juga di Desa Sumbergede. Berdasarkan data hasil wawancara dengan Sekdes Desa Sumbergede permasalahan pada anak PMI seperti kurang optimalnya pengasuhan bagi anak, anak yang mulai mengenal pergaulan bebas sehingga mulai merokok, mengonsumsi miras dan kenakalan remaja lainnya. Selain itu karena lebih banyak ibu yang menjadi PMI dibanding ayah, pada akhirnya menyebabkan pengasuhan anak menjadi tanggung jawab ayah. Namun dalam pelaksanaannya kebanyakan dari ayah yang bersangkutan kurang begitu cakap dalam mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Sehingga pengasuhan anak dibebankan kepada kerabat terdekat seperti nenek/kakek, paman/bibi ataupun sanak saudara yang lain. Peran dalam pengasuhan yang dilakukan oleh

kerabat seringkali cenderung kurang maksimal. Anak yang diasuh oleh kerabat terdekat seperti kakek/nenek justru kerap menunjukkan perilaku yang bermasalah (maladaptif), mengalami gangguan emosional, dan bahkan tidak patuh pada pengasuh. Hal ini merupakan akibat dari kurang sesuainya pola pengasuhan yang diberikan. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan model pengasuhan yang tepat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk diterapkan pada anak pekerja migran (Nurannisa et al., 2017).

Peran yang dilakukan oleh orangtua yang bertindak sebagai seorang pekerja migran tidak hanya sebatas mengenai pemenuhan atas hak dasar dari anak. Pemenuhan hak dasar yang dimaksud adalah hanya memberikan pemenuhan atas makan, minum, pakaian, dan sebagainya. Melainkan peran yang dilakukan juga harus mencakup atas pemenuhan aspek psikologis dan sosial bagi anak secara optimal. Peran yang dilakukan oleh orangtua dalam hal pemenuhan aspek psikologi dan sosial ini yang akan berdampak pada tumbuh kembang anak (Widyarto & Rifauddin, 2020).

Meskipun orangtua tidak dapat secara langsung melakukan pengawasan karena harus menjadi pekerja migran, namun hal ini bukan berarti orangtua lalai dalam memberikan pengasuhan dan cenderung memanjakan anak. Sikap lalai dan memanjakan yang dilakukan dalam pola pengasuhan kepada anak maka akan berdampak pada rendahnya tingkat kompetensi sosial yang terjadi pada anak. Sehingga menyebabkan anak akan memiliki sikap yang kurang baik seperti tidak dewasa, lemahnya kontrol diri, kecenderungan sulit untuk dapat menghargai orang lain dan bahkan dalam kasus yang lebih ekstrim akan menunjukkan perilaku kenakalan remaja (Widyarto & Rifauddin, 2020). Kasus seperti ini banyak terjadi di daerah basis PMI. Berbagai permasalahan ini terjadi juga disalah satu kantong PMI yang ada di Provinsi Lampung, tepatnya yaitu di Desa Sumber Gede, Kabupaten Lampung Timur.

Dengan adanya permasalahan tersebut, Unit Pelaksana Teknis BP2MI Bandar Lampung berupaya untuk memberikan alternatif solusi. Hal ini dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut agar dampaknya tidak terjadi secara berkepanjangan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menginisiasi

sebuah program yang bersinergi dengan Pemerintah Desa Sumbergede Lampung Timur. Bentuk inisiasi yang dilakukan oleh UPT BP2MI Bandar Lampung adalah program standar pola pengasuhan yang seharusnya dilakukan oleh keluarga PMI yang ditinggal bekerja ke luar negeri.

Program yang diinisiasi oleh UPT BP2MI Bandar Lampung tersebut diberi nama program Pakem Indonesia. Program Pakem Indonesia atau yang merupakan kepanjangan dari Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia adalah sebuah program yang bersinergi antara UPT BP2MI dan beberapa aktor lain yang ikut terlibat. UPT Bandar Lampung selaku inisiator, *berkolaborasi* dengan beberapa pihak lain untuk dapat merealisasikan program ini. Beberapa aktor yang terlibat dalam program ini diantaranya Pemerintah Desa Sumbergede, PKK Desa Sumbergede, Tokoh Agama Sumbergede dan Karang Taruna Desa Sumbergede, Kabupaten Lampung Timur sebagai stakeholder dari program ini. Program ini merupakan salah satu bentuk perwujudan atas perlindungan sosial bagi PMI dan keluarganya (Mubarika, 2020).

Program Pakem Indonesia merupakan sebuah program yang berasal dari proyek hibah mikro pada tahun 2020. Program ini muncul dari sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO) yang berasal dari *American Council of Young Political Leader* (ACYPL) yang berhasil diraih oleh salah satu pengantar kerja UPT BP2MI Bandar Lampung. Program ini diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atau *United States Department of State*. Kegiatan yang ada dalam program ini yaitu mempelajari tentang berbagai program sosial bagi keluarga PMI khususnya dalam upaya memperkuat ketahanan keluarga bagi PMI. Konsep Program Pakem Indonesia diadopsi dari Program *Young Southeast Asian Leaders Initiative* (YSEALI) 2019 yang mana program tersebut diprakarsai oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat atau *United States Department of State* (Mubarika, 2020).

Program ini secara jelas mengatur tentang tata cara pemberdayaan kelompok marjinal khususnya yang ada di Amerika Serikat, yaitu kalangan imigran dan pengungsi. Mengingat program Pakem Indonesia ini mengadopsi program YSEALI maka kurikulum yang digunakan dalam program ini pun menggunakan

kurikulum yang hampir sama. Kurikulum yang digunakan dalam program ini yaitu kurikulum *Guiding Good Choices* (GGC) yang dikembangkan oleh *University of Washington*. UPT BP2MI Bandar Lampung selaku penanggung jawab dalam program ini tidak sebagai aktor tunggal, melainkan juga melibatkan *stakeholder* lain sebagai aktor dalam setiap penyelenggaraan program tersebut (Mubarika, 2020).

Masing-masing *stakeholder* tersebut membangun relasi antar aktor sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang dimiliki. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Desa Sumbergede bertindak sebagai aktor pelaksana atau *Level Street Bureaucracy* dari program yang dibantu dengan beberapa perangkat desa seperti PKK, Karang Taruna, dan Tokoh Agama. Sementara peran UPT BP2MI dalam program ini adalah sebagai inisiator program, yang selanjutnya dalam proses pelaksanaan program ini UPT BP2MI berperan dalam hal *monitoring* terkait dengan proses pelaksanaan program. Peran antar-aktor begitu penting dalam melakukan sinergi dalam proses pelaksanaan program ini. Agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan efektif maka perlu memperhatikan secara serius dalam proses implementasinya. Khususnya dari para implementor utama pelaksana program dalam hal ini Pemerintah Desa Sumbergede dan UPT BP2MI Bandar Lampung sebagai pihak yang melakukan *monitoring* program.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ulfa (inisiator program) pada 3 Desember 2021, program Pakem Indonesia merupakan program *pilot project*. Definisi *pilot project* merujuk pada pelaksanaan kegiatan proyek percontohan yang dirancang sebagai pengujian atau trial dalam rangka untuk menunjukkan keefektifan suatu pelaksanaan program, mengetahui dampak pelaksanaan program dan keekonomisannya. Menurut Setiawan (2014), bagi sebagian institusi pemerintah yang memiliki struktur organisasi yang sangat besar dan tersebar, metode *pilot project* ini relatif sulit untuk dilaksanakan. Selain itu, dengan sumber daya baik waktu dan anggaran yang terbatas atas pelaksanaan uji coba tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif (Setiawan & Emirisa, 2014).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Zainal (Sekdes Sumbergede) pada 10 Desember 2021, salah satu permasalahan dalam proses pelaksanaan program

Pakem Indonesia adalah berkaitan dengan anggaran. Hal itu dikarenakan dalam proses pelaksanaan dari program ini pemerintah desa menggunakan alokasi anggaran dari dana desa. Pemerintah Desa Sumbergede harus membagi anggaran dana desa dengan skala prioritas yang dilakukan. Sehingga pemerintah desa sedikit mengalami kendala dalam proses pelaksanaan program dikarenakan terbatasnya anggaran yang dapat dialokasikan. Oleh karena itu faktor anggaran menjadi salah satu faktor penyebab dari terkendalanya program ini.

Dengan mengacu kepada solusi yang diberikan oleh BP2MI Bandar Lampung melalui program Pakem Indonesia dalam upaya memberikan ketahanan keluarga PMI, seorang *decision maker* dapat mengambil kebijakan terkait prioritas *pilot project* pada implementasi program Pakem Indonesia yang baru dikembangkan secara obyektif berdasarkan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan model *Integrated Implementation Model* teori yang dikemukakan oleh Soren C Winter. Dalam hal ini yang berkaitan dengan beberapa aspek implementasi program Pakem Indonesia seperti dari segi Perilaku Organisasi dan Antar-Organisasi atau *Organizational and Inter-Organizational behavior*, Perilaku Level Bawah atau *Street Level Buraucratic Behavior* dan Perilaku Target Sasaran atau *Target Group Behavior* (Rahmawati et al., 2020). Berdasarkan dari fenomena yang telah penulis jabarkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana proses implementasi program Pakem Indonesia di Desa Sumbergede. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Program Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pakem Indonesia) di Desa Sumbergede Lampung Timur**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah dalam penelitian yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Program Pandu Keluarga Migran Indonesia (Pakem Indonesia) di Desa Sumbergede Lampung Timur?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis proses implementasi program Pakem Indonesia
2. Menganalisis faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan rekomendasi bagi badan/lembaga terkait, masyarakat serta segala pihak pada umumnya berkaitan langsung dengan implementasi program Pakem Indonesia serta untuk mengetahui faktor pendukung dan hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang arti penting dan mekanisme sebuah proses implementasi kebijakan seharusnya dijalankan khususnya terkait program Pakem Indonesia. Sementara bagi lembaga/badan terkait hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai pelaksanaan sebuah kebijakan seharusnya dilakukan.

2. Manfaat Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang teori implementasi kebijakan serta sebagai tambahan referensi bagi penulis sejenis.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengangkat tema tentang Analisis Program Pakem Indonesia di Desa Sumbergede Lampung Timur. Penelitian ini melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yang berkaitan dengan implementasi sebuah program atau kebijakan, serta penelitian tentang konsep ketahanan keluarga PMI dari berbagai perspektif yang digunakan. Peneliti mengambil empat hasil penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai perbandingan dalam penelitian yang disajikan, sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Aminuddin, 2019) tentang dampak dari pekerja migran yang bekerja ke luar negeri terhadap harmonisasi keluarga yang bersangkutan ditinjau dari perspektif psikologi islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh keluarga tenaga kerja wanita untuk mewujudkan keharmonisan dalam sebuah keluarga. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keharmonisan dari keluarga yang ditinggal bekerja ke luar negeri dipengaruhi oleh beberapa unsur seperti;

1. Unsur fungsional: yaitu suami/istri saling bahu-membahu dalam hal pencari nafkah.
2. Transaksional: hasil dari keluarga yang bekerja ke luar negeri di investasikan dalam bentuk investasi produktif seperti tanah, toko, rumah.
3. Struktural: setiap keluarga menginginkan kenyamanan dan kedamaian sehingga tercipta keluarga sakinah mawaddah warahmah.

4. Komunikasi: Upaya pasangan dalam mewujudkan keharmonisan hubungan jarak jauh dengan berkomunikasi antar suami istri, anak dan keluarga melalui handphone dan media online lainnya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Wardani, 2020) tentang dampak dari ketahanan keluarga yang ditinggal bekerja ke luar negeri oleh istri atau ibu dalam keluarga yang bekerja sebagai PMI ke luar negeri. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kondisi dari PMI dari persepektif perbedaan perekonomian sebelum dan setelah bekerja ke luar negeri, dan untuk mengetahui dampak yang terjadi setelah pekerja migran perempuan yang bersangkutan berhenti dari pekerjaannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan keluarga pekerja migran yang sebelumnya berada dalam kategori kurang sejahtera, menjadi lebih baik setelah anggota keluarga yang bersangkutan bekerja ke luar negeri. Kesejahteraan keluarga pekerja migran terjadi pada bidang seperti ekonomi, dan pendidikan. Kesejahteraan keluarga pekerja migran yang anggotanya menjadi PMI, cenderung lebih baik daripada keluarga yang anggotanya tidak berprofesi sebagai PMI.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Putra, 2020) tentang pola asuh orang tua pengganti dalam memenuhi hak dasar anak buruh migran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola asuh orang tua pengganti dalam mengasuh anak dan pemenuhan terhadap hak dasar anak pekerja migran. Hasil dari penelitian ini yaitu pola asuh orang tua pengganti dalam pemenuhan hak dasar anak pekerja migran adalah pola asuh demokratis dan pola asuh permisif. Sementara pemenuhan atas hak dasar anak pekerja migran diberikan oleh orang tua pengganti berupa pemenuhan hak pokok meliputi sandang, pangan, dan papan, kemudian hak khusus yaitu pemenuhan hak pendidikan sekolah untuk anak asuhnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. Hal itu dikarenakan pada penelitian ini akan menganalisis pelaksanaan sebuah program tentang upaya penguatan ketahanan keluarga PMI dalam hal pola asuh anak yang berkesinambungan dan menonjolkan fungsi serta peran desa dalam memperhatikan aspek ketahanan keluarga bagi keluarganya yang bekerja ke luar negeri sebagai PMI. Selain itu, pada penelitian ini juga terdapat pembaharuan mengenai kurikulum pola asuh bagi keluarga PMI

yang dilakukan dalam sebuah program yang bernama Pakem Indonesia. Penelitian ini memiliki judul “**Analisis Program Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia (Pakem Indonesia) di Desa Sumbergede Lampung Timur**” bertujuan untuk menganalisis mengenai isu yang menjadi pokok permasalahan dalam upaya penguatan ketahanan keluarga PMI dalam program Pakem Indonesia di Desa Sumbergede Lampung Timur dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soren C Winter mengenai implementasi kebijakan yang didalamnya terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam sebuah implementasi kebijakan. Indikator yang digunakan seperti perilaku organisasi dan antarorganisasi, perilaku level *street* birokrasi dan perilaku kelompok sasaran.

2.2 Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan merupakan serangkaian rancangan dan instrumen yang digunakan sebagai dasar dari rencana dalam sebuah pelaksanaan suatu aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan hal kepemimpinan, dan tata cara bertindak yang dalam hal ini dilakukan oleh pemerintah, lembaga, organisasi, dsb. Sementara menurut (Muadi et al., 2016) kebijakan diartikan sebagai serangkaian aktivitas atau tindakan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah, dalam suatu lingkungan tertentu dengan memberikan gambaran mengenai hambatan ataupun kesempatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya (Muadi et al., 2016).

Sementara istilah kebijakan publik merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *public policy*. Banyak ahli menerjemahkan kata *policy* menjadi kebijakan. Tetapi ada juga yang menerjemahkan istilah *policy* menjadi kebijaksanaan. Meskipun belum ada kesepakatan secara mutlak tentang terjemahan dari kata *policy*, namun secara umum kata *policy* cenderung diterjemahkan sebagai kebijakan. Oleh karena itu, *public policy* diterjemahkan menjadi kebijakan public (Anggara, 2016).

Secara sederhana kebijakan publik didefinisikan sebagai suatu konsep dasar rencana yang dibuat oleh pemerintah atau organisasi public. Kebijakan ini

digunakan untuk mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan masalah ataupun solusi yang diberikan kepada khalayak ramai atau publik. Sedangkan secara umum, pengertian mengenai kebijakan publik adalah segala hal yang dikerjakan dan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah dalam kaitannya dengan kepentingan umum (Hernimawati et al., 2017). Kebijakan publik ini merupakan suatu ilmu multidisipliner yang tak hanya berfokus pada satu teori semata melainkan juga melibatkan banyak disiplin ilmu dalam mengkaji sebuah isu.

Kajian mengenai isu kebijakan publik mulai muncul dan berkembang pada awal 70-an, yang dipelopori oleh Harold D. Laswell. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan dalam Howlett dan Ramesh (1995:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sebuah program yang diproyeksikan dengan beberapa aspek yang ada di dalamnya seperti tujuan, nilai, dan praktik tertentu dalam mencapai sebuah tujuan. Sementara menurut George C. Edwards III dan Ira Sharkansky dalam Suwitri (2008: 10) mendefinisikan kebijakan public sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk program pemerintah untuk mencapai sasaran atau tujuan (Mariyati, 2013).

Sementara definisi tentang kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dye dalam (Muadi et al., 2016) kebijakan publik adalah tentang tindakan, aktivitas, atau kegiatan yang dipilih oleh pemerintah untuk dapat dilakukan atau tidak dilakukan. Lebih lanjut Dye, mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu harus ada tujuannya dan bersikap objektif serta meliputi semua tindakan pemerintah (Muadi et al., 2016). Berdasarkan dari pengertian mengenai kebijakan publik di atas pada dasarnya kebijakan publik adalah tentang sebuah kepentingan bersama yang didalamnya memperhatikan unsur-unsur dalam proses pembentukannya. Sehingga dengan demikian maka kebijakan publik dapat diterjemahkan sebagai serangkaian aktivitas atau tindakan pilihan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah guna mencapai suatu tujuan tertentu yang berorientasi kepada kepentingan publik (Muadi et al., 2016).

Kebijakan publik secara umum dapat dipahami sebagai salah satu upaya atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dalam pemerintahannya, yang mana kebijakan tersebut dapat berbentuk dalam

sebuah peraturan ataupun keputusan. Hal yang terjadi di lapangan adalah bahwa sebuah kebijakan publik adalah hasil dari sebuah proses politik dalam sebuah sistem negara. Dimana di dalamnya terkandung berbagai langkah dan upaya yang seharusnya dijalankan oleh pemerintah, yang dalam hal ini bertindak selaku penyelenggara negara. Kebijakan publik tidak bisa lepas dari peran dan fungsi birokrasi yang dijalankan oleh seorang birokrat.

Secara empiris, permasalahan yang sering muncul dan berkaitan dengan sebuah kebijakan publik pada umumnya cenderung *kompleks*. Kompleksnya permasalahan yang ada dalam sebuah kebijakan publik pada akhirnya akan menimbulkan sebuah fenomena. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada saat proses formulasi dilakukan atau pada saat kebijakan publik diimplementasikan, tetapi juga menyangkut mengenai dampak atau implikasi yang timbul atas sebuah kebijakan.

Kebijakan publik harus dapat mengakomodir berbagai kepentingan yang berbeda menjadi satu kesatuan yang dapat memberikan solusi terhadap sebuah permasalahan publik. Tak hanya itu dalam implementasinya kebijakan publik juga harus mampu untuk dapat mengintegrasikan berbagai kepentingan pihak tertentu menjadi sebuah produk kebijakan yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan khalayak umum. Sehingga salah satu fungsi dan tujuan mengenai tinjauan terhadap isu kebijakan publik adalah untuk dapat menganalisis berbagai tahapan dalam sebuah kebijakan publik. Harapannya dengan mengkaji lebih mendalam mengenai tahapan dari kebijakan publik ini maka akan terciptanya sebuah kebijakan publik yang baik.

Berbagai tahapan yang dilalui dalam sebuah kebijakan tersebut tergabung sebagai sebuah siklus pembuatan sebuah kebijakan publik. Selanjutnya tiap tahapan pada proses pembentukan sebuah kebijakan publik di dalamnya memiliki berbagai langkah dan metode yang lebih terperinci untuk dilakukan. Berbagai tahapan tersebut mempunyai berbagai fungsi dan manfaat serta konsekuensinya bagi para aktor pembuat kebijakan.

2.3 Implementasi Kebijakan

Apabila melihat definisi mengenai implementasi dari kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI, maka implementasi diartikan sebagai suatu pelaksanaan

atau penerapan (KBBI, 2021). Kata implementasi umumnya dikaitkan dengan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan yang hendak dicapai. Implementasi juga erat kaitannya dengan sebuah tindak lanjut dari rencana atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Biasanya dalam proses implementasi juga berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh implementor. Implementasi pada dasarnya merupakan hal yang semestinya dilakukan setelah program atau kebijakan telah ditetapkan. Dalam proses implementasi dari sebuah kebijakan aktor yang terlibat didalamnya tak hanya dari instansi atau lembaga yang terkait dengan kebijakan yang bersangkutan. Melainkan dalam proses implementasinya akan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kekuatan politik, sosial bahkan ekonomi dari pihak tertentu (Rafi'i et al., 2020).

Implementasi menurut teori dari Jones diartikan sebagai sebuah proses menjalankan sebuah program sampai akhirnya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Sementara Implementasi menurut Grindel diartikan sebagai aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh birokrat yang berkaitan dengan hal yang bersifat administratif pada sebuah program tertentu (Rafi'i et al., 2020). Sedangkan definisi mengenai implementasi dalam kamus besar Webster diartikan sebagai sebuah proses penyediaan sarana guna melaksanakan sebuah tujuan tertentu. Pengertian ini didukung oleh pendapat dari ahli lain yaitu Ripley dan Franklin yang mendefinisikan implementasi sebagai suatu proses yang dilakukan setelah adanya sebuah regulasi yang berkaitan dengan berbagai unsur dari sebuah kebijakan khususnya dalam mencapai sebuah tujuan tertentu (Edoardus E. Maturbongs, 2012).

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn memberikan definisi mengenai implementasi kebijakan sebagai suatu tindakan yang akan dilakukan dalam upaya mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan menurut Van Horn dilakukan oleh aktor baik secara individu maupun dalam sebuah kelompok tertentu. Menurut Van Meter & Van Horn tahapan dari implementasi kebijakan akan mulai terjadi ketika proses legitimasi dari sebuah kebijakan sudah diberikan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan sumberdaya pelaksana kebijakan, pendanaan yang telah disepakati serta ditetapkan dalam

tahapan kebijakan. Menurut Schnider dan Ingram dalam (Rahmawati et al., 2020) dengan adanya distorsi yang terjadi pada proses implementasi kebijakan, maka hal itu dapat berdampak terhadap perbedaan sebuah kebijakan dengan apa yang telah direncanakan. Hal ini menjadi isu penting bagi implementor kebijakan agar sebuah desain kebijakan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditentukan (Rahmawati et al., 2020).

Selanjutnya dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model yang dijelaskan oleh para ahli. Model implementasi kebijakan diantaranya dijelaskan oleh Edward III, Robbins, dan Soren C Winter. Ketiga ahli tersebut menjelaskan tentang konsep dari model implementasi kebijakan publik beserta indikator yang digunakannya. Konsep model implementasi kebijakan menurut Edward memiliki empat variabel yang digunakan sebagai indikator dalam mengukur proses implementasi kebijakan. Variabel indikator yang diberikan oleh Edward dalam mengukur sebuah implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Rafi'i et al., 2020). Secara lebih rinci keempat variabel tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Komunikasi, dalam hal ini dalam proses implementasi kebijakan komunikasi menjadi salah satu hal yang penting supaya sebuah kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya. Dengan adanya komunikasi yang efektif dari implementor kebijakan dan kelompok sasaran maka implementasi dari sebuah kebijakan akan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Sumber daya, yang dimaksud dengan sumberdaya adalah bahwa setiap implementasi kebijakan seharusnya didukung oleh sumberdaya yang sesuai. Baik sumberdaya dalam hal SDM ataupun sumberdaya finansial, guna menunjang berlangsungnya sebuah kebijakan dengan baik.
3. Disposisi, dalam hal ini merujuk pada sikap dari para implementor kebijakan dalam menjalankan sebuah kebijakan atau program.
4. Struktur birokrasi, hal ini menjadi penting dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Dengan struktur birokrasi yang jelas maka diharapkan proses implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Sementara konsep model implementasi yang dikemukakan oleh Robbins lebih menjelaskan tentang sebuah konstruksi implementasi dalam bentuk sebuah program pengembangan untuk mencapai suatu keberhasilan implementasi. Dalam model implementasi yang dipaparkan oleh Robbins terdapat sebuah hubungan yang kuat dari aspek yang menjadi pendukung keberlangsungan implementasi sebuah kebijakan. Hubungan yang saling mempengaruhi ini pada akhirnya menjadi sebuah tolok ukur dari keberhasilan implementasi sebuah kebijakan. Berbagai hubungan yang dimaksud adalah berupa hubungan yang berkaitan erat dengan struktur lembaga sebuah organisasi, kerjasama yang dilakukan antar organisasi, dan kepentingan sebuah organisasi serta pencapaian yang hendak dituju oleh organisasi (Baharuddin et al., 2020). Ketiga variabel tersebut digunakan sebagai indikator dalam mengukur keberhasilan sebuah implementasi kebijakan dari model implementasi kebijakan Robbins.

Selain kedua model implementasi tersebut, ada sebuah model implementasi lain yang cukup menarik perhatian dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Bahkan banyak ahli yang menaruh perhatian lebih pada model implementasi ini. Hal itu dikarenakan model implementasi ini tergolong ke dalam kategori model implementasi generasi ketiga atau dengan kata lain merupakan model implementasi kebijakan yang cenderung baru. Semua itu didasarkan pada konsep yang diterapkan pada model implementasi ini yaitu sebuah model yang dikenal dengan istilah *Integrated Implementation Model*. Model implementasi ini dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Soren C. Winter (Winter, 2004).

Pada model ini, lebih menitikberatkan bahwa dalam sebuah proses implementasi kebijakan tidak dapat berdiri secara sendiri melainkan ada aspek lain yang ikut mempengaruhi dalam proses implementasi sebuah kebijakan. Oleh karena ini pada model ini terdapat sebuah pandangan mengenai konsep model *integrated*. Model *integrated* diartikan bahwa dalam implementasi kebijakan merupakan serangkaian aktivitas yang saling berkesinambungan yang dimulai dari tahap kebijakan yaitu formulasi hingga evaluasi. Sehingga pada model implementasi ini tidak terlepas dari proses politik dan administrasi. Pada dasarnya model implementasi kebijakan ini begitu erat kaitannya pada bentuk *design* kebijakan. Dalam hal ini *design* kebijakan berpengaruh dalam proses formulasi kebijakan

yang akan menentukan arah sebuah kebijakan akan berjalan. Selain itu pada proses ini juga dipengaruhi oleh aspek sosial ekonomi masyarakatnya. Pada model ini lebih menekankan bahwa sebuah implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan dari kebijakan itu dijalankan (Winter, 2004).

Sejalan dengan hal itu, menurut Winter sebuah implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan aspek yang saling berkesinambungan dan mempengaruhi antarsatu sama lain. Dalam hal ini menurut Winter implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti perilaku antar-organisasi, perilaku implementor sebagai pelaksana langsung kebijakan, dan perilaku dari kelompok sasaran kebijakan. Selanjutnya pada setiap unsur tersebut terdapat dimensi yang akan menjadi tolok ukur dalam menentukan keberhasilan dari suatu kebijakan publik. Secara lebih rinci aspek yang mempengaruhi sebuah implementasi kebijakan dari model Soren C Winter adalah sebagai berikut:

1. Perilaku organisasi dan antar-organisasi

Pada unsur yang pertama yaitu perilaku organisasi dan antarorganisasi memiliki dua dimensi di dalamnya yaitu dimensi komitmen dan dimensi koordinasi. Dalam proses sebuah implementasi kebijakan tidak dapat dipungkiri bahwa pasti akan memerlukan peran dari pihak lain dalam upaya mencapai sebuah tujuan dari implementasi kebijakan. Pentingnya peran dari organisasi lain dalam upaya untuk dapat mencapai sebuah tujuan dari kebijakan publik akan memerlukan sebuah hubungan yang terjalin antarorganisasi. Hubungan antarorganisasi ini akan memberikan dampak perubahan dari sebuah kebijakan yang bersifat berkelanjutan yang akan diwujudkan dalam sebuah tindakan dari implementor dalam menjalankan sebuah kebijakan. Selain itu, di sisi lain proses implementasi yang dipengaruhi oleh perilaku organisasi dan hubungan antarorganisasi maka akan berimplikasi pada efektifitas dan efisiensi kinerja pada sebuah kebijakan publik.

2. Perilaku Birokrasi Level Bawah.

Dimensi yang terdapat pada perilaku birokrasi level bawah adalah diskresi. Dalam KBBI online istilah diskresi dapat diartikan sebagai suatu kebebasan sikap dalam mengambil sebuah keputusan ketika menghadapi

situasi dan kondisi tertentu (KBBI, 2021). Dimensi ini menjadi penting dalam implementasi kebijakan, mengingat implementor kebijakan dituntut untuk mampu menjalankan atau melaksanakan sebuah program agar dapat membuat sebuah keputusan penting dalam upaya mencapai tujuan dari sebuah implementasi kebijakan. Kemampuan ini wajib dimiliki oleh implementor dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik tak jarang para implementor dituntut untuk dapat mengambil suatu keputusan dengan mempertimbangkan pengaruh faktor dominan di luar kewenangan formal yang dimiliki.

Sejalan mengenai hal itu, menurut Lipsky bahwa dalam sebuah implementasi kebijakan birokrasi level bawah atau yang sering dikenal dengan istilah *level street bureaucracy* memiliki pengaruh yang dominan dalam sebuah implementasi kebijakan. Peran dari birokrasi level bawah ini pada dasarnya akan berorientasi pada hasil yang akan dicapai dan langkah atau cara apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga dalam praktik pelaksanaan suatu kebijakan publik peran dari birokrasi level bawah ini akan berkaitan langsung dengan masyarakat ataupun suatu grup sasaran dari sebuah kebijakan. Dalam hal ini birokrasi level bawah akan senantiasa berhubungan dengan pemerintah desa, tokoh agama, karang taruna, PKK dsb.

3. Perilaku kelompok sasaran

Aspek yang ketiga, yaitu kelompok sasaran atau yang biasa dikenal dengan istilah *Target Group Behavior* memiliki dimensi yaitu berupa respon positif dan respon negatif dari masyarakat atau kelompok yang menjadi target dari kebijakan terkait. Pada aspek perilaku kelompok sasaran ini akan mempengaruhi secara langsung mengenai beberapa aspek yang ada dalam sebuah implementasi kebijakan. Dalam hal ini perilaku kelompok sasaran akan mempengaruhi aspek seperti kinerja birokrat ataupun birokrasi level bawah sebagai implementor, dan juga akan mempengaruhi terhadap dampak dari pelaksanaan sebuah kebijakan. Hal itu dikarenakan respon yang diberikan oleh target sasaran kebijakan yang juga bertindak sebagai objek dari pelaksanaan sebuah kebijakan akan

dijadikan sebagai salah satu acuan apakah sebuah kebijakan sudah dijalankan dengan semestinya atau justru sebaliknya.

Pada aspek perilaku kelompok sasaran dalam sebuah implementasi program atau kebijakan publik dapat diartikan sebagai sekelompok orang, organisasi, ataupun individu yang akan menjadi objek dari pelaksanaan suatu kebijakan yang dapat memberikan respon pada proses implementasinya baik itu berupa respon positif ataupun negatif. Sehingga kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh masyarakat dalam merespon setiap pelaksanaan kebijakan yaitu berupa dukungan ataupun penolakan. Oleh karena itu, hal ini akan menjadi faktor kunci yang dapat mempengaruhi hasil dari sebuah implementasi.

2.4 Program

Menurut Jones dalam (Shalfiah, 2017) program diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk dapat mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan atas pengertian tersebut maka dapat dilihat bahwa program merupakan penjabaran atas sebuah langkah-langkah guna mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan pemerintah ataupun sebuah lembaga tertentu maka program dapat diartikan sebagai upaya guna mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Pada umumnya program-program tersebut ada dalam sebuah Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau bahkan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah. Dalam sebuah program biasanya terdapat beberapa karakteristik tertentu yang dimiliki. Karakteristik ini dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi sebuah aktivitas dapat dikatakan sebagai sebuah program atau tidak. Karakteristik tersebut dikategorikan dalam 3 hal yang meliputi:

1. Program cenderung membutuhkan staf, dalam hal ini staf digunakan sebagai seorang aktor ataupun pelaku pelaksana dari program bersangkutan.
2. Program pada umumnya memiliki anggaran, anggaran ini dapat digunakan sebagai salah satu instrumen untuk mengidentifikasi dari berjalannya sebuah program.

3. Program memiliki identitas sendiri, dalam hal ini apabila program dapat dijalankan secara efektif maka akan mendapat pengakuan dari publik.

Menurut Jones program terbaik adalah program yang berasal dari sebuah model teoritis yang jelas, yang dalam hal ini berkaitan dengan proses formulasi dari program yang bersangkutan. Program yang baik maka dalam tahap pembuatannya akan menentukan terlebih dahulu mengenai masalah sosial yang akan diatasi untuk kemudian melakukan intervensi. Atas dasar hal ini maka sebelum membuat sebuah program diperlukan sebuah pemikiran yang serius tentang permasalahan yang terjadi dan penyebab masalah itu terjadi untuk selanjutnya mencari solusi terbaik atas permasalahan tersebut (Shalfiah, 2017).

2.5 Pakem Indonesia

Pakem Indonesia atau Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia merupakan proyek hibah mikro tahun 2020 dari organisasi nonprofit Amerika Serikat bernama ACYPL (American Council of Young Political Leader) yang berhasil diraih oleh Ulfa Mubarika (staff perlindungan BP2MI Bandar Lampung) yang mewakili Indonesia selaku alumni Professional Fellowship Program–Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) 2019. Pakem Indonesia mengkombinasikan antara kampanye atau diseminasi informasi menjadi pekerja migran prosedural di desa dan workshop untuk memandu keluarga pekerja migran Indonesia untuk mendukung perkembangan anak mereka demi meningkatkan ketahanan keluarga. Pakem Indonesia akan berkolaborasi bersama dengan berbagai pihak agar program ini dapat berkesinambungan di desa sekaligus memberikan model program yang dapat dilakukan di desa dalam pertanggungjawabannya dalam upaya perlindungan kepada PMI dan keluarganya.

Sesuai amanat UUD No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia pasal 42 menyatakan secara jelas tentang tugas dan tanggungjawab pemerintah desa. Pakem Indonesia menggandeng pemerintah desa untuk memberikan wacana baru bagi program desa yang peka terhadap PMI dan keluarganya. Selain itu, program ini dapat membantu pemerintah desa dalam proses diseminasi informasi ketenagakerjaan ke luar negeri dan melakukan

pemberdayaan kepada PMI dan keluarganya melalui kegiatan pendidikan orangtua atau pengasuh dalam pengasuhan atau parenting mendukung ketahanan keluarga mereka.

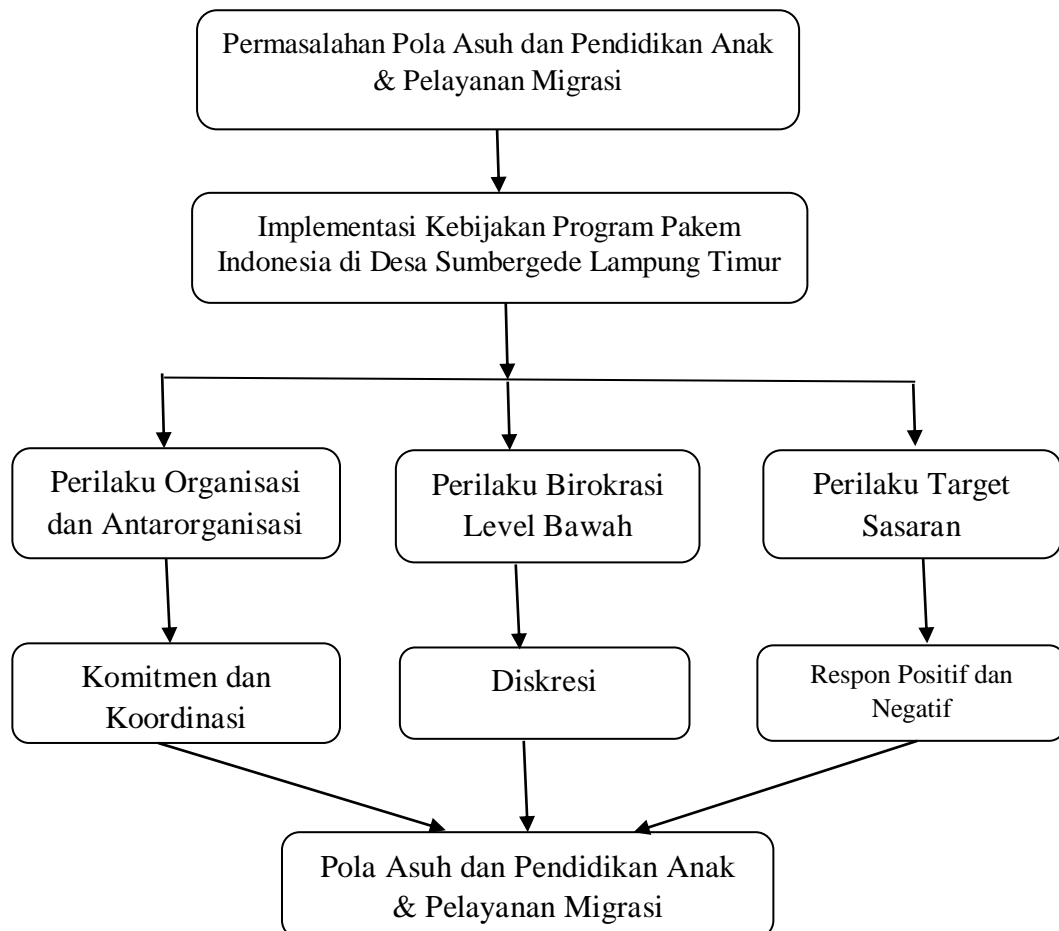
Selain dengan pemerintah desa, pakem Indonesia juga berkolaborasi dengan pakar parenting, anggota PKK (anggota pemberdayaan kesejahteraan keluarga), karang taruna, dan juga aktivis buruh migran yaitu SBMI. Kegiatan ini bersinergi dengan berbagai pihak dengan tujuan agar dapat berkesinambungan dilakukan oleh desa secara mandiri karena pihak-pihak yang berkolaborasi bersama akan langsung dilatih sebagai mentor ikut serta selama kegiatan berlangsung (kepala desa, anggota PKK, karang taruna). Program ini menggunakan kurikulum Guiding Good Choices (GGC), beberapa contoh kurikulum yang terdapat di dalamnya diantaranya adalah pencegahan pengaruh buruk dan perilaku bermasalah, petunjuk penerapan hidup sehat dan aturan yang baik dalam keluarga, menghindari masalah, pengelolaan konflik, dan memperkuat ikatan keluarga.

Kurikulum GGC dikembangkan oleh Dr. David Hawkins dan Dr. Richard Catalano dari University of Washington untuk orangtua dari anak-anak usia 9-14 tahun. Anak-anak PMI yang ditinggalkan oleh orangtua mereka bekerja ke luar negeri tak lepas dari resiko memiliki perilaku bermasalah. Mereka diasuh oleh salah satu orangtua atau orangtua pengganti (nenek/bibi/kerabat lainnya). Anak-anak dihadapkan pada resiko di sekolah, komunitas, teman sebaya, dan terkadang dalam keluarga mereka. Beberapa anak mulai mengonsumsi alkohol, rokok, obat-obatan terlarang, putus sekolah, free sex, atau terlibat dalam kenakalan atau kekerasan. Anak-anak lainnya, meskipun menghadapi resiko yang sama tidak memiliki masalah perilaku remaja seperti ini karena mereka dilindungi oleh faktor-faktor seperti ikatan keluarga yang kuat, gaya hidup sehat, serta memiliki standar perilaku yang jelas di keluarganya. Dalam program ini, orangtua atau pengasuh dan mentor akan belajar cara memperkuat ikatan keluarga, menetapkan standar keluarga yang jelas, mengajari anak-anak keterampilan yang mereka perlukan untuk membuat pilihan yang baik dan meningkatkan keterlibatan anak dalam keluarga. Harapannya, anak-anak akan mampu mengejar cita-citanya dan menjadi generasi emas Indonesia.

2.6 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan acuan yang dibuat oleh penulis dalam memberikan batasan pada proses penelitian agar fokus penelitian hanya pada satu masalah yang akan diteliti. Pada penelitian kali ini kerangka pikir yang digunakan yaitu mengacu pada teori model implementasi dari Soren C Winter. Selanjutnya untuk mengukur keberhasilan dari model implementasi ini terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan proses implementasi. Indikator yang digunakan pada model implementasi ini meliputi Perilaku Organisasi dan Antar Organisasi, Level Bawah Birokrasi dan Kelompok Sasaran. Indikator tersebut akan digunakan dalam mengukur keberhasilan dari kebijakan program Pakem Indonesia di Desa Sumbergede Lampung Timur. Secara lebih jelas kerangka pikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1 Kerangka Pikir



Sumber: dioalah oleh peneliti,2021

Berdasarkan data gambar 1 menunjukkan bahwa kerangka pikir yang digunakan peneliti dalam mengukur keberhasilan implementasi program Pakem Indonesia yang ada di Desa Sumbergede Lampung Timur yaitu menggunakan teori yang dikemukakan oleh Soren C Winter. Dalam kerangka pikir tersebut menjelaskan bahwa untuk menilai keberhasilan atau output dari implementasi program Pakem Indonesia yaitu dengan 3 unsur yang masing masing setiap unturnya memiliki dimensinya. Selanjutnya implementasi Program Pakem Indonesia dapat dikategorikan berhasil apabila memenuhi unsur unsur yang digunakan dalam kerangka pikir tersebut.

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut (Yuliani, 2019) penelitian deskriptif kualitatif dapat dijelaskan sebagai metode yang menggunakan pendekatan kualitatif sederhana dengan menggunakan alur induktif. Secara sederhana alur induktif dapat diartikan sebagai dalam sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif maka proses awal dimulai dengan sebuah proses atau fenomena tertentu sebagai penjelas yang kemudian akan di genarilasaki dan ditarik sebuah kesimpulan dari proses atau fenomena tersebut (Yuliani, 2019) Sementara menurut (Tobing et al., 2016) penelitian kualitatif merupakan sebuah prosedur dalam pengambilan data dimana data yang dihasilkan berupa data deskriptif dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang tertulis dari suatu fenomena dan perilaku tertentu. Pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif akan dijabarkan secara alami dan disajikan secara holistik dengan tujuan agar data yang dihasilkan tidak mengisolasi individu maupun organisasi kedalam sebuah variabel/hipotesis (Tobing et al., 2016).

Pengertian lain dipaparkan oleh (Gunawan, 2016) penelitian kualitatif diartikan sebagai jenis penelitian yang hasil dari temuannya tidak diperoleh dari hasil pengolahan dengan prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lainnya. Pada penelitian kualitatif menurut (Gunawan, 2016) penelitian mencoba untuk memahami dan menafsirkan sebuah pola interaksi tingkah laku manusia dalam suatu situasi dan kondisi tertentu atas dasar dari perspektif peneliti sendiri, namun tetap pada situasi alamiahnya tanpa di rekayasa. Metode kualitatif lebih mengutamakan pada aspek fenomologis yang mengutamakan sebuah penghayatan (Gunawan, 2016). Secara bahasa fenomologi berasal dari kata *phenomenon* yang

diambil dari bahasa Yunani yang memiliki arti menampakan diri atau dalam istilah lain disebut juga dengan *to show it self*. Arti istilah dari fenomenologi ini dipopulerkan oleh Hegel pada abad dua puluh. Pendekatan fenomenologi ini digunakan dalam metode penelitian guna mencari hakikat atau esensi dalam memahami pengalaman pada kesadaran manusia (Raco, 2018).

Tujuan dari penelitian kualitatif adalah guna menjelaskan fenomena yang terjadi di masyarakat secara lebih mendalam dengan mengumpulkan data yang lebih lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa dalam riset ini kelengkapan dan kedalaman data yang diteliti merupakan suatu hal yang sangat penting. Penulis menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan suatu penjelasan yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu kontak *setting* tertentu yang dikaji dalam sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. Guna untuk mendapatkan hasil yang baik maka penulis harus mengumpulkan data dan fakta yang terjadi pada fenomena pelaksanaan program Pakem Indonesia sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga PMI di Desa Sumbergede Lampung Timur. Kemudian menelaahnya dengan teori yang sudah ada dan bisa mendapatkan hasil yang komperhensif.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Penetapan fokus pada penelitian kualitatif ini memberi batasan pada ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan dan bertujuan untuk mengarahkan penelitian agar lebih terfokus dan terarah pada isu yang akan diteliti. Fokus pada penelitian ini memberikan batasan dalam lingkup studi dan dalam pengumpulan data. Sehingga penelitian akan lebih terfokus kepada pokok masalah yang menjadi tujuan awal dalam penelitian ini yang bersifat umum yang berkaitan dengan implementasi program yang berada di Desa Sumbergede Lampung Timur. Berdasarkan kerangka pikir dan judul penelitian yang telah peneliti gambarkan sebelumnya yakni berfokus pada analisis mengenai implementasi program Pakem Indonesia dan faktor yang menjadi pendukung serta penghambat dari pelaksanaan program.

A. Analisis Implementasi Program

Adapun fokus dari penelitian ini yaitu mengacu pada model implementasi dari Soren C winter yang di dalamnya terdapat 3 unsur dalam mengukur keberhasilan dari sebuah implementasi kebijakan diantaranya:

1. Perilaku Organisasi dan Antarorganisasi

Pada unsur pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan yaitu komitmen dan koordinasi yang dilakukan oleh organisasi dan antarorganisasi. Aktor-aktor perilaku organisasi dan antar-organisasi dalam hal ini yaitu UPT BP2MI Bandar Lampung dan satgas Pakem Indonesia (Ketua Satgas, Sekretaris Satgas, PKK, Karang Taruna).

2. Perilaku Birokrasi Level Bawah

Pada unsur yang kedua yang digunakan untuk mengukurnya yaitu diskresi dari *level street bureaucracy* terkait dengan sikapnya dalam menjalankan program. Aktor birokrasi level bawah dalam program ini yaitu satgas Pakem Indonesia. Pemilik kewenangan dalam hal melakukan diskresi yaitu Ketua Satgas Pakem Indonesia yang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Desa Sumbergede.

3. Perilaku Kelompok Sasaran

Pada unsur ketiga yang digunakan untuk mengukurnya yaitu respon yang diberikan oleh target sasaran kebijakan, yaitu berupa respon positif dan negatif. Target sasaran dalam hal ini yaitu anggota keluarga PMI dan CPMI Desa Sumbergede.

B. Faktor yang Berpengaruh

Selain ketiga unsur yang diberikan oleh Soren dalam mengukur keberhasilan implementasi program Pakem Indonesia di Desa Sumbergede Lampung Timur, fokus pada penelitian ini juga untuk mengetahui faktor internal ataupun eksternal yang menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung dari pelaksanaan program.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sumbergede Lampung Timur yang menjadi tempat Pakem diterapkan. Desa Sumbergede merupakan desa pelopor program ini sebagai upaya ketahanan keluarga PMI. Sehingga Desa Sumbergede dipilih menjadi lokasi pada penelitian ini.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subjek darimana data diperoleh. Sumber data dalam sebuah penelitian menjadi komponen yang begitu penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian. Berdasarkan dari sumbernya, data dapat dibagi kedalam dua bentuk yaitu data primer dan data sekunder. Secara lebih jelas mengenai sumber data primer dan data sekunder dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Menurut (Nugrahani, 2014) Sumber data primer merupakan sumber data yang memuat data utama yakni data yang diperoleh secara langsung di lapangan, misalnya narasumber atau informan (Nugrahani, 2014). Data primer merupakan data yang peneliti dapatkan secara langsung dari lokasi penelitian baik melalui observasi, data hasil wawancara peneliti dengan narasumber maupun instrumen lainnya yang termasuk kedalam data primer. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui hasil dari wawancara dan observasi mengenai pelaksanaan program Pakem Indonesia sebagai salah satu upaya penguatan ketahanan keluarga PMI di Desa Sumbergede Lampung Timur. Alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini yakni tape recorder dan catatan hasil penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data tambahan yang digunakan sebagai pelengkap data primer yang biasanya data diperoleh dari sebuah bacaan atau tulisan yang berasal dari sumber tertentu seperti buku, dokumen, foto, dsb. Sumber data sekunder ini digunakan sebagai pelengkap apabila tidak ditemukan data dari narasumber ataupun informan utama sebagai sumber data primer (Nugrahani, 2014). Pada dasarnya data sekunder digunakan untuk

melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder didapatkan melalui catatan maupun dokumen pendukung yang berkaitan dengan proses implementasi program pakem Indonesia sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga PMI di Desa Sumbergede Lampung Timur.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah menggunakan tehnik pengumpulan data kualitatif. Yaitu berupa pengumpulan data dalam bentuk kata-kata dan pernyataan bukan berupa angka. Dalam proses pengumpulan sebuah data dapat dilakukan melalui berbagai *setting*, sumber, dan cara dalam mengumpulkan setiap data yang diperlukan. Apabila ditinjau dari *setting*-nya data pada penelitian kualitatif dikumpulkan pada *setting* alamiah sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian. Selanjutnya jika ditinjau dari segi cara dalam pengumpulan data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi atau dengan menggabungkan semuanya.

1. Observasi

Menurut Usman dan Purnomo dalam (Hardani et al., 2020) Observasi adalah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pada penelitian ini observasi dilakukan dengan mengamati proses-proses yang terjadi secara kompleks baik secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan proses implementasi program Pakem Indonesia sebagai upaya perlindungan sosial bagi keluarga PMI dalam bentuk pola asuh dan pendidikan anak serta pelayanan migrasi PMI di Desa Sumbergede Lampung Timur. Pada penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada lokasi pelaksanaan program. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai pelaksanaan dari pola asuh dan pendidikan anak dan pelayanan migrasi di Desa Sumbergede Lampung Timur. Observasi pelaksanaan dari pola asuh dan pendidikan anak yaitu berupa observasi mengenai keberlangsungan proses pendidikan dan pola asuh bagi anak PMI yang dilakukan melalui perpustakaan mini yang lokasinya berada di area sekitar Balai Desa Sumbergede.

2. Wawancara

Menurut (Sugiyono, 2013) wawancara dapat diartikan sebagai sebuah metode yang dilakukan melalui pertemuan antara dua pihak untuk saling bertukar informasi atau ide gagasan tertentu dengan menggunakan cara tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber. Sehingga data yang diperoleh dapat dikonstruksikan maknanya dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data dengan wawancara ini dilakukan guna menggali informasi lebih mendalam kepada narasumber tentang fenomena yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Sementara Menurut (Raco, 2018) wawancara atau *interview* merupakan tindakan yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang dibutuhkan, yang tidak dapat diperoleh melalui kuesioner maupun observasi. Hal ini dikarenakan pada dasarnya tidak semua data dapat diperoleh dengan observasi sehingga peneliti harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan. Dengan adanya wawancara, peneliti mengubah orang dari sebagai objek menjadi subjek dalam penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini yakni:

Tabel 3 Data Informan dalam Penelitian

NO	Informan	Data yang dicari
1.	Kepala Bagian Perlindungan dan Pemberdayaan UPT BP2MI Bandar Lampung	Mengenai <i>follow up</i> proses koordinasi lanjutan terkait dengan <i>monitoring</i> program.
2.	Staf Bagian Perlindungan	Menjadi <i>key informant</i> program, mengenai inisiator, perencana, pelaksana dan keberlanjutan program.
3.	Pemerintah Desa Sumbergede	Data mengenai pelaksanaan program dari pandangan aparat desa dan sikap serta peran desa di dalamnya.
4.	PKK Desa Sumbergede	Data mengenai keterlibatan PKK dalam pelaksanaan program serta pandangan

		PKK tentang program
		Data mengenai keterlibatan PKK dalam pelaksanaan program serta pandangan karang taruna tentang program
5.	Karang Taruna Desa Sumbergede	
6.	Keluarga PMI	Data mengenai respon yang diberikan oleh target sasaran
7	CPMI	Data mengenai respon yang diberikan oleh target sasaran

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2021

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang sumber datanya diperoleh dari hasil yang diolah dari berbagai dokumen guna mendukung data dalam penelitian. Secara harfiah dokumentasi sendiri berasal dari kata dokumen yang memiliki arti barang-barang yang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Data-data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung merupakan data sekunder, sedangkan data-data yang dikumpulkan dengan teknik observasi dan wawancara cenderung merupakan data primer atau data yang langsung didapat dari pihak pertama (Hardani et al,2020). Teknik dokumentasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen dari arsip UPT BP2MI Bandar Lampung dan portal berita mengenai implementasi program Pakem Indonesia sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga PMI di Desa Sumbergede Lampung Timur. Selain itu sumber data dokumentasi juga diperoleh dari data dokumen arsip Desa Sumbergede.

3.6 Teknik Analisis Data

Pada sebuah penelitian, data yang diperoleh perlu untuk dianalisis dengan menggunakan teknik analisis yang tepat agar data yang diperoleh sesuai. Secara sederhana teknik analisis data dapat diartikan sebagai sebuah proses dalam

mencari dan menyusun sebuah data secara sistematis. Data yang sebelumnya telah diperoleh dengan berbagai cara seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian di analisis agar menjadi sebuah data yang utuh. Dalam proses menganalisis sebuah data dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari mengklasifikasikan data dalam satu kategori tertentu, memaparkan data ke dalam sub-unit, membuat sintesa, menyusun sebuah pola, sampai dengan membuat simpulan agar dapat mudah untuk dipahami (Hardani et al., 2020).

Selanjutnya menurut Miles dan Huberman dalam (Hardani et al., 2020) dalam menganalisis data dapat dibagi kedalam 3 alur kegiatan yang dilakukan secara bersama. Ketiga alur yang dimaksud yaitu pertama reduksi data, kedua penyajian data, dan yang ketiga adalah berupa penarikan simpulan. Secara lebih jelas ketiga alur tersebut dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai sebuah proses pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi sebuah data yang telah diperoleh dari hasil observasi. Selanjutnya data yang telah diperoleh akan direduksikan agar data dapat ditransformasikan dengan menggunakan berbagai cara melalui proses seleksi yang dilakukan secara ketat. Reduksi data bertujuan untuk dapat menganalisis sebuah data agar menjadi lebih tajam, kemudian memilih data mana yang penting dan data yang tidak diperlukan. Pada penelitian ini, tahap reduksi data dilakukan berdasarkan hasil temuan dari peneliti melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi dari program Pakem Indonesia sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga PMI di Desa Sumbergede Lampung Timur. Sehingga nantinya peneliti dapat lebih fokus dengan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk memberikan sebuah informasi tentang hal yang sedang diteliti, untuk kemudian peneliti akan mengambil sebuah tindakan dari sebuah data tersebut. Dalam sebuah

penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam penyajian data pada sebuah penelitian kualitatif diantaranya seperti dalam bentuk uraian singkat, dalam bentuk bagan, dalam bentuk *flowchart* dan sebagainya. Hal ini dilakukan guna mempermudah peneliti dalam memahami bentuk data yang diperoleh dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini data yang disajikan berupa data dalam bentuk teks naratif, tabel, gambar, diagram dan bagan. Dengan adanya penyajian data diharapkan akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan pada apa yang telah dipahami. Dalam menyajikan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mendeskripsikan serta memaparkan berbagai hasil temuan yang diolah dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan kepada narasumber.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dalam proses pengolahan data. Secara sederhana simpulan dapat diartikan sebagai pokok dari temuan dalam penelitian yang telah dijabarkan dalam sebuah uraian. Namun simpulan dalam sebuah penelitian berbeda halnya dengan ringkasan penelitian. Dalam hal ini simpulan dalam sebuah penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah atau juga tidak dapat menjawab sebuah rumusan masalah. Hal itu dikarenakan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif hanya bersifat sementara.

Ketika berada di lapangan ada kemungkinan untuk berkembang sesuai dengan temuan yang terjadi di lapangan. Temuan dalam penelitian dapat berupa sebuah deskripsi mengenai objek yang sebelumnya abstrak namun setelah diteliti dapat berubah menjadi lebih jelas. Dalam hal ini temuan dapat berupa bentuk tertentu seperti hubungan kausal, hipotesis atau bahkan teori. Pada penelitian ini penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari hasil penelitian berdasarkan pada sumber data primer dan sekunder mengenai implementasi program Pakem Indonesia sebagai upaya penguatan ketahanan keluarga PMI di Desa Sumbergede Lampung Timur.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Dalam rangka untuk mengukur keabsahan atau validitasi sebuah data dalam sebuah penelitian kualitatif maka diperlukan instrumen teknik menilai keabsahan sebuah data yang tepat. Pada penelitian kualitatif, sebuah data temuan dapat dikatakan valid jika tidak ada perbedaan antara data yang diberikan oleh peneliti dengan peristiwa yang terjadi pada obyek yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang di dalamnya harus memenuhi aspek persyaratan sebagai suatu *disciplined inquiry*. Dimana dalam *disciplined inquiry* memiliki standar yang perlu untuk dipenuhi dalam sebuah penelitian. Beberapa standar yang dimiliki diantaranya adalah *truth value* atau nilai kebenaran, *applicability* atau dapat diaplikasikan, *consistency* atau konsisten dalam penerapannya, dan *neutrality* atau mengandung aspek netral. Dalam mengukur keabsahan sebuah data dalam penelitian kualitatif maka harus memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pada penelitian kualitatif keabsahan data dapat dikatakan terpenuhi syaratnya apabila telah memenuhi kriteria seperti *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Keseluruhan dari kriteria tersebut sesuai dengan empat standar pada *disciplined inquiry* yaitu *truth value*, *applicability*, *consistency*, dan *neutrality*. Secara lebih lengkap kriteria yang telah dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Credibility*

Pada kriteria yang pertama yaitu *credibility* maka data yang telah dikumpulkan sebelumnya harus mengandung unsur kebenaran di dalamnya. Dalam hal ini sebuah data hasil dari penelitian kualitatif harus memenuhi aspek untuk dapat dipercaya oleh berbagai pihak dan dapat diterima oleh pihak yang memberikan informasi data yaitu informan pemberi data informasi dalam penelitian. Selanjutnya untuk mengukur tingkat kredibilitas dari sebuah data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu dengan melakukan perpanjangan pengamatan, melakukan peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Berbagai cara tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan bertujuan agar semakin erat hubungan yang terjalin antara seorang peneliti dengan nara sumber. Sehingga diharapkan nantinya akan semakin terbentuk sebuah *rapport*, jauh lebih akrab, saling terbuka, dan dapat mempercayai antara satu sama lain. Sehingga tidak akan muncul sebuah keterbukaan dalam memberikan sebuah informasi. Dengan adanya keterbukaan dalam memberikan sebuah informasi maka harapannya kehadiran peneliti dalam mengumpulkan sebuah data tidak lagi dianggap mengganggu bagi objek yang diteliti.

Pada proses perpanjangan pengamatan yang dilakukan harus memperhatikan pada fokus pengujian terhadap data yang diperoleh. Dalam hal ini peneliti perlu untuk memperhatikan bahwa data yang telah diperoleh kemudian dilakukan pengecekan kembali apakah data yang telah diperoleh sesuai atau tidak, atau justru terjadi perubahan data setelah dilakukan pengamatan. Jika telah dilakukan proses pengecekan kembali dilapangan dan data yang ditemukan sudah sesuai dan benar tanpa adanya perubahan maka waktu perpanjangan pengamatan dapat untuk diakhiri.

b. Peningkatan Ketekunan

Dalam melakukan peningkatan ketekunan dalam mengumpulkan sebuah data berarti peneliti harus melakukan pengamatan secara lebih cermat dan mendalam serta dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan dari peningkatan ketekunan adalah untuk menemukan unsur dan ciri data yang relevan terhadap persoalan yang sedang dikaji. Sehingga dengan meningkatkan ketekunan, maka kepastian data yang diperoleh dan urutan peristiwa akan dapat dicatat secara lebih sistematis.

c. Triangulasi

Metode triangulasi digunakan dalam pengecekan keabsahan data penelitian dengan memanfaatkan berbagai hal yang ada diluar data untuk memeriksa serta membandingkan data berdasarkan sumber data primer maupun data sekunder sebagai pembanding terhadap data yang didapat.

Metode ini dalam sebuah pengujian kredibilitas pada penelitian dapat dilakukan melalui berbagai cara, dan berbagai waktu. Sehingga nantinya akan menciptakan triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Ketiga bentuk triangulasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber data: pada triangulasi ini akan menggali kebenaran informasi tertentu dari berbagai metode dan sumber informasi data.
2. Triangulasi metode/teknik: pada jenis triangulasi ini digunakan dengan menggali kebenaran informasi dan data dengan cara yang berbeda.
3. Triangulasi waktu: triangulasi waktu digunakan untuk menggali sebuah data berdasarkan dari rentang waktu tertentu dalam menilai tingkat kebasahan sebuah data.

2. *Transferability*

Menurut Moeleng dalam (Hardani et al., 2020) *transferability* diartikan bahwa dalam memenuhi kriteria pada sebuah penelitian maka hasil data yang diperoleh pada konteks tertentu semestinya dapat diaplikasikan atau ditransfer pada *setting* tertentu. Hal ini bertujuan untuk dapat membangun keteralihan yang dapat dilakukan dengan cara menguraikan data secara lebih rinci. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan melaporkan hasil penelitian secara lebih teliti dan cermat dalam menggambarkan konteks lokasi penelitian diselenggarakan dengan menggunakan acuan pada fokus penelitian yang dilakukan. Dengan memberikan uraian data yang rinci maka diharapkan hasil temuan penelitian dapat dipahami dengan lebih mudah.

3. *Kebergantungan (Dependability)*

Dalam penelitian kualitatif kriteria ini digunakan untuk menilai tentang kualitas mutu dari sebuah penelitian. Dalam penelitian kualitatif uji kebergantungan (*Dependability*) dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian. Hal itu dilakukan untuk mengukur kualitas dari hasil penelitian kualitatif. Dalam hal ini pengukuran dapat dilakukan dengan melihat apakah peneliti dalam mengumpulkan data yang

dicari sudah memperhatikan aspek kehati-hatian atau justru belum memperhatikan aspek tersebut. Dalam hal ini kebanyakan dari peneliti seringkali membuat kesalahan ketika membuat sebuah konsep dari rencana penelitian, dalam melakukan pengumpulan data, kemudian dapat melakukan interpretasi dari data yang telah diperoleh dikumpulkan yang akan dikumpulkan dalam sebuah laporan penelitian yang utuh.

Sehingga cara yang dapat dilakukan untuk dapat menentukan bahwa hasil sebuah penelitian dapat dikategorikan baik dan dapat dipertahankan (*dependable*) adalah dengan menggunakan teknik *dependability* audit. Teknik ini dilakukan dengan cara meminta seorang *independen* auditor untuk dapat mengulas kembali aktivitas yang telah dilakukan oleh peneliti (Hardani et al., 2020).

4. *Confirmability*

Secara sekilas pada penelitian kualitatif uji *confirmability* hampir mirip dengan uji keabsahan data *dependability*. Oleh karena itu pengujian data dapat dilakukan secara bersamaan. Dalam hal pengujian yang dilakukan pada instrumen *Comfirmability* yaitu melakukan uji terhadap hasil yang telah diteliti yang dikaitkan dengan proses dalam sebuah penelitian. Harapannya agar tidak ditemukan kejanggalan dalam penelitian, sekaligus untuk memastikan bahwa agar tidak terjadi hal yang tidak sesuai dalam penelitian yaitu sebelumnya tidak ada proses penelitian yang dilakukan namun hasil dari penelitiannya ada. Konsep kepastian yang dimaksudkan disini adalah untuk mengukur dalam sebuah penelitian yang telah disepakati bahwa hasil dari temuan sifatnya menjadi objektif bukan lagi subjektif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program Pandu Keluarga Pekerja Migran Indonesia di Desa Sumbergede Lampung Timur maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Program Pakem Indonesia menjadi salah satu penyebab berkurangnya permasalahan PMI dan keluarganya dalam mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi.: Hal itu karena implementor program telah mengimplementasikannya sesuai dengan tugas dan fungsinya. Meskipun dalam hal komitmen cenderung adanya kerawanan untuk dapat melanggarnya dikarenakan tidak adanya komitmen tertulis yang memperkuat legalitas komitmen antar aktor sehingga komitmennya tidak bersifat *sustainable*. Hal ini berbanding terbalik dengan koordinasi yang sudah dijalankan dengan baik hingga terciptanya sebuah jejaring komunikasi. Birokrasi level bawah dalam melakukan diskresi yaitu dengan cara mereplikasi kegiatan program agar lebih adaptif sesuai dengan kapasitas yang dimiliki desa. Sehingga masyarakat sebagai target sasaran menyambut baik dengan adanya program ini karena sejalan dengan rasa empati masyarakat desa dalam memberikan perlindungan bagi PMI dan keluarganya. Namun kurangnya sosialisasi program menjadi bentuk respon negatif dari masyarakat serta terbatasnya alokasi anggaran dan sarana prasarana penunjang menjadi penghambat dari implementasi program.

5.2 Saran

Dalam hal merencanakan sebuah program bagi masyarakat khususnya program yang sifatnya sebagai *pilot project* perlu memperhatikan mengenai faktor keberlanjutan program. Hal ini perlu untuk dilakukan agar pelaksanaan sebuah program yang berjalan dalam jangka waktu yang relatif panjang dapat berjalan sesuai dengan rencana atau *agenda setting* yang telah ditetapkan. Terlebih apabila

program tersebut memerlukan multi aktor dalam setiap pelaksanaannya. Dalam kaitannya mengenai program Pakem Indonesia, beberapa saran dan masukannya yang dapat penulis berikan terkait dengan implementasinya adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan sebuah program, terlebih program yang sifatnya *pilot project* dan melibatkan multi aktor maka perlu memperhatikan terkait dengan kejelasan isi program agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan awal program. Perlu adanya panduan atau regulasi yang terperinci agar aktor pelaksana tidak salah dalam menafsirkan isi kebijakan sehingga dapat menjalankannya sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Aktor pelaksana program sebaiknya memikirkan mengenai alternatif sumber anggaran dalam menjalankan program dan tidak hanya bertumpu pada anggaran dana desa semata agar pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan tidak terkendala dari segi anggaran.
3. Perlu adanya kepastian jadwal pelaksanaan pendidikan bagi anak agar yang bersangkutan tidak mengalami kebingungan pada saat akan mengikuti proses pendidikan.
4. Pihak terkait dalam hal ini yaitu UPT BP2MI Bandar Lampung selaku inisator program dan Satgas Pakem Indonesia selaku implementor program seharusnya melakukan evaluasi berkala dalam hal pelaksanaan program guna mengetahui tingkat optimalitas dari pelaksanaan program dan guna mengetahui hambatan dari pelaksanaan program agar dapat memberikan solusi untuk dapat menjalankan program secara lebih efektif.
5. Satgas Pakem seharusnya mulai melakukan sosialisasi tentang adanya program melalui perkumpulan ibu ibu pengajian, perkumpulan bapak-bapak tahlilan, posyandu, dan PKK sebagai solusi dalam mengatasi terbatasnya alokasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA:

- Aminuddin, T. A. (2019). Keharmonisan Keluarga Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Psikologi Keluarga Islam di Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*, 8(5), 55.
- Anggara, S. (2016). *Pengantar Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Anggraini, P., Monanisa, M., & Arafat, Y. (2020). Dampak Tenaga Kerja Wanita (Tkw) Terhadap Sosial Ekonomi Keluarga Yang Ditinggalkan Di Kecamatan Tanjung Raja. *JURNAL SWARNABHUMI : Jurnal Geografi Dan Pembelajaran Geografi*, 5(1), 35.
- Ansori, L. (2015). Diskresi Dan Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Yuridis*, 2(1), 134–150.
- Baharuddin, Ansari, M. I., & Tahir, N. (2020). *Implementasi Program Inovasi Pelayanan Berkelanjutan Inseminasi Buatan Dan Gangguan Reproduksi Sapi di Kabupaten Pinrang*. 1(2).
- BPS. (2020). *BPS: 270,20 juta Penduduk Indonesia Hasil SP2020*. <https://www.bps.go.id/news/2021/01/21/405/bps--270-20-juta-penduduk-indonesia-hasil-sp2020.html>
- Charli, C. O., Sari, P. I. P., & Ade, F. S. (2020). Pengaruh Lingkungan Kerja, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Salatiga. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 3(1), 1–10.
- Dibyantoro, B. & M. M. A. (2014). Pola Penggunaan Remitan Tenaga Kerja Indonesia (Tki) Serta Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Daerah Asal. *Teknik PWK (Perencanaan Wilayah Kota)*, 3(2), 319–332.
- Edoardus E. Maturbongs. (2012). Implementasi Kebijakan Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C Di Kabupaten Merauke. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Sosial "Societas,"* 1(1), 52–63.
- Gunawan, I. (2016). Metode Penelitian Kualitatif Imam Gunawan. In *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara.
- Hamid, A. (2019). *Kebijakan Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Migran (Tinjauan Undang-Undang No 18 TAHUN 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia)* (Issue 18). Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Ustiawaty, R. A. F. J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Ria Rahmatul Istiqomah. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (H. Abadi (ed.); Issue March). Pustaka Ilmu Grup.
- Haryono. (2017). Globalisasi dan Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (Studi Deskriptif Sosiologi Kependudukan). *Jurnal Hermeneutika*, 3(2), 25–36.
- Hernimawati, H., Dailiati, S., & Sudaryanto, S. (2017). Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan Dan Arsip (Bpa) Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(1), 6–15.
- KBBI. (2021a). *Diskresi*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskresi>
- KBBI. (2021b). *Implementasi*. <https://kbbi.web.id/implementasi>
- Khuana, J. R. (2020). Pengaturan Dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Migran Lintas Negara Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(8), 1275.
- Mariyati, T. (2013). Strategi Implementasi Kebijakan Publik dalam Mendorong Percepatan Pengembangan Pengguna Internet Public Policy Implementation Strategy in Encouraging Acceleration of Internet Users Development. *Buletin Pos Dan Telekomunikasi*, 11(2), 147–158.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep Dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 195–224.
- Mubarika, U. (2020). *Penguatan Peran Desa melalui Program Pandu Keluarga PMI*. <https://www.bp2mi.go.id/index.php/berita-detail/penguatan-peran-desa-melalui-program-pandu-keluarga-pmi>
- Ndarujati, D. (2021). *Jurnal Sosial Sains. Peran Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Pekerja Migran Indonesia Di Taiwan*, 1(1), 30–34.
- Noveria, M. (2017). Migrasi Berulang Tenaga Kerja Migran Internasional: Kasus Pekerja Migran Asal Desa Sukorejo Wetan, Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 12(1), 25.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*.
- Nurannisa, H., Hasanah, U., & Tarma, T. (2017). Pengaruh Granparenting Terhadap Perkembangan Emosi Remaja Pada Keluarga Tki Di Kecamatan Gekbrong Cianjur-Jawa Barat. *JKKP (Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan)*, 4(02), 62–65.
- Oktamia, D. S., & Fauziah, N. M. (2018). Implementasi Kebijakan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(01), 1–19.
- Puspawati, A. A. (2018). *GAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BINA KELUARGA TKI DI KABUPATEN MALANG Ani*. 12(September 2013), 115–122.

- Puspawati, A. A. (2020). STAKEHOLDER ANALYSIS ON THE IMPLEMENTATION OF FAMILY DEVELOPMENT PROGRAM FOR INDONESIAN MIGRANT WORKERS USING SOFT SYSTEM METHODOLOGY. *Eurasia: Economics & Business*, 4(1), 1–9.
- Puspitawati, H., & Setioningsih, S. S. (2011). Fungsi Pengasuhan dan Interaksi Dalam Keluarga Terhadap Kualitas Perkawinan dan Kondisi Anak Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita. *Jurnal Ilmiah Keluarga Dan Konseling*, 4(1).
- Putra, G. Y. (2020). *Pola asuh orang tua pengganti dalam memenuhi hak dasar anak buruh migran di desa ngunut kabupaten tulungagung*.
- Putri, A. N., Riany, W., & Julia, A. (2019). Faktor Pendorong dan Penarik Migrasi Internasional (Studi Kasus : TKI dan TKI Purna di Desa Majasari Kecamatan Sliyeg Kabupaten Indramayu). *Prosiding Ilmu Ekonomi*.
- Raco, J. (2018). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. Grasindo.
- Rafi'i, A., Indarajaya, K., & Hikmah, N. (2020). Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP) Volume 6 No. 1 Februari 2020*, 6(7), 1099–1104.
- Rahmawati, A. (2020). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM PENGEMBANGAN KOMODITAS PADA KAWASAN STRATEGI KABUPATEN DI KABUPATEN BONE*.
- Rahmawati, A., Ansari, M. I., & Parawangi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. *Universitas Muhammadiyah Makassar*, 1(1), 218–231.
- Setiawan, C., & Emirsa, E. S. (2014). Analisis Kebijakan Terkait Prioritas Pilot Project Implementasi Sistem Informasi Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Pekommas*, 17(3), 129–138.
- Shalfiah, R. (2017). Peran Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Mendukung program-program Pemerintah Kota Bontang. *Peran Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang*, 1(3), 975–984.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D* (19th ed.). ALFABETA, CV.
- Tobing, D. hizki, Herdiyanto, Y. K., & Astiti, D. P. (2016). Bahan Ajar Metode Penelitian Kualitatif. In *Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udaya*.
- Wardani, N. K. (2020). *Perubahan Kondisi Kesejahteraan Keluarga Pekerja Migran Perempuan Sebelum Dan Sesudah Bekerja Ke Luar Negeri (Studi Kasus Di Desa Wantisari Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak-Banten)*. 17.

- Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3), 501–513.
- Widyarto, W. G., & Rifauddin, M. (2020). Problematika Anak Pekerja Migran di Tulungagung dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Jurnal Kajian Bimbingan Dan Konseling*, 5(3), 91–103.
- Winter, S. C. (2004). *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration*. Dalam Peters, B Guy and Pierre, Jon, 2003. *Handbook of Public Administration*. Sage Publications Ltd.
- Yalia, M. (2014). *IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA SOSIAL MEDIA TRADISIONAL DI JAWA BARAT*. Vol.6(01).
- Yuliani, W. (2019). Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif Dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling. *Quanta*, 3(1), 9–19.